

titik balik

by 05c 2020

Submission date: 11-May-2020 01:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 1321456052

File name: TITIK_BALIK_PENDIDIKAN__REVISED_3_a_turnitin.docx (2.93M)

Word count: 17069

Character count: 114586

SEKAPUR SIRIH

Kisah Tiada Akhir

Laju perubahan tidak akan pernah dapat dihentikan, karenanya sebuah sumber daya manusia yang berkualitas (*qualified human resource*) menjadi sebuah modal utama yang dapat digunakan sebagai senjata untuk menghadapi perubahan tersebut. Dalam dunia maju, ketrampilan dan kemampuan dalam penguasaan sains, teknologi dan komunikasi menjadi kualitas yang harus dimiliki oleh setiap sumber daya manusia (SDM). Akan tetapi, seiring dengan semakin canggihnya perkembangan jaman, terdapat nilai-nilai manusia yang cenderung berkurang diantaranya adalah kearifan serta moralitas. Generasi manusia baru semakin dihadapkan pada berbagai macam tantangan baru yang semakin kompleks. Oleh karenanya, penanaman nilai-nilai moral harus ditanamkan sejak dini. Nilai-nilai tersebut bersumber dari kearifan tradisi-kultural dan agama serta transformasi dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Dengan semakin kuatnya nilai-nilai tersebut tertanamkan, generasi baru

akan semakin pula terbantu dalam menghadapi tantangan yang ditawarkan laju perubahan jaman.

Pendidikan merupakan sebuah kunci dalam menghadapi tantangan pada jaman atau abad kemajuan. Abad/jaman yang dikenal sebagai abad pengetahuan. Mengembangkan dan memajukan pendidikan menjadi tugas yang tidak hanya diemban oleh pemerintah tetapi oleh seluruh warga negara. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara perlu dan harus memperhatikan perkembangan pendidikan agar tetap dapat mengikuti perkembangan dunia dan tidak menjadi tertinggal. Menurut sebuah penelitian yang dilaporkan oleh Sydney-based Lowy Institute, yang berjudul "*Beyond access: Making Indonesia's education system work*", kekurangan terbesar dari sistem pendidikan negara di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia, lebih disebabkan oleh ketidakberhasilan Negara atau pemerintah dalam mengatur "politik dan kekuasaan" alih-alih pada kurangnya dana yang dianggarkan untuk mengelola pendidikan. Mereka melaporkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia berhasil 'memaksa' diberlakukannya pendidikan dasar wajib sembilan tahun (dari SD sampai

SMA), keberhasilan program wajar (wajib belajar) tersebut dapat dikatakan 'kurang' berhasil. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil pendidikan tersebut di mana keberhasilan hanya ada pada tingkat mengentaskan generasi muda dari 'buta huruf'. Menurut Unesco, tingkat melek huruf Indonesia adalah sekitar 95% dengan tingkat melek huruf kaum muda pada 99,67% (2018). Namun, dari indikator pendidikan lainnya diperoleh hasil yang menggambarkan kondisi yang jauh lebih suram. Sebuah PISA (*The Programme for International Student Assessment*) tes yang dilakukan oleh OECD pada tahun 2015 memperlihatkan bahwa banyak peserta didik di Indonesia memiliki nilai tes (sains, matematika, dan literasi) yang lebih rendah dibandingkan dengan hasil skor rata-rata yang diperoleh OECD. 42% siswa Indonesia gagal memenuhi standar minimum di ketiga bidang tersebut dan dikalahkan oleh siswa dari negara tetangga, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Indonesia, dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 271 juta jiwa (data sementara dari BPS Indonesia 2019), merupakan negara terpadat keempat di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnik atau

suku bangsa (lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa) di Tanah Air (2010, BPS Indonesia) dan memiliki wilayah yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang membentang sepanjang 3.181 mil di sepanjang garis khatulistiwa antara Pasifik dan Samudra Hindia. Banyak suku bangsa dengan berbagai perbedaannya serta luasnya wilayah menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk meningkatkan tingkat dan mutu pendidikan nasional.

Sampai dengan ⁷ sekarang, Indonesia terus berjuang untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi warga negaranya. Dengan 42% angka generasi muda yang gagal mencapai nilai minimum tes PISA (OECD, 2015) dan dengan hanya 9% warga ⁷ di atas usia 25 tahun yang memiliki gelar sarjana (World Bank, 2016), menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki standar pendidikan terendah dari semua negara anggota ASEAN. Namun, ketika kita kembali menengok ke belakang, catatan menunjukkan adanya penurunan angka rasio guru murid dari 20:1 (2004) menjadi 16:1 (2017). Meskipun rasio ini secara keseluruhan masih terhitung rendah (36,3%), jika dibandingkan dengan Malaysia, dan Thailand, rasio partisipasi kasar (APK) ini lebih tinggi

dibandingkan dengan Vietnam (20%) dan Filipina (24,2%), meskipun tetap di bawah Malaysia (42%) dan Thailand (49,3%) (Institut Statistik UNESCO - UIS).

Sejak pertengahan tahun 2000-an, serangkaian reformasi di bidang pendidikan telah dilaksanakan oleh Indonesia termasuk diantaranya desentralisasi sistem sekolah, peningkatan standar guru, dan peningkatan anggaran pendidikan. Diperlukannya sebuah upaya yang lebih substansial untuk mengatasi kelemahan struktural dalam sistem pendidikan Indonesia dan untuk membawanya ke standar negara-negara berkembang lainnya di kawasan ASEAN.

Di dalamnya, sebuah sistem pendidikan tidak akan terlepas dari komponen-komponen yang mempengaruhi perkembangan system tersebut, meliputi input, proses, output, lingkungan, dan outcomes (hasil). Komponen-komponen tersebut mempunyai fungsi tertentu yang menjalankan sebuah fungsi struktur untuk mencapai tujuan sistem tersebut. Dasar pendidikan, tujuan pendidikan, dan peserta didik merupakan bagian dari 'input' pada sistem pendidikan. Sedangkan pendidik dan

tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, administrasi, serta anggaran pendidikan merupakan bagian dari 'proses' pada sistem pendidikan. Sedangkan masyarakat dan sosial merupakan bagian dari komponen lingkungan dan komponen hasil terlihat dari bagaimana mutu hasil pendidikan tersebut terlihat (tingkat kesuksesan peserta didik dalam persaingan dunia). Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya 'menyalahkan' salah satu komponen (dari sistem pendidikan) yang ada ketika menganalisa rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Sesuai dengan hasil penelitian dari Surjanti (2012) yang menyatakan bahwa guru sebenarnya tidak bertanggung jawab mutlak tentang pendidikan, mengingat bahwa faktor di luar kontrol lebih menentukan dalam pembentukan sikap peserta didik.

Akan tetapi, pada pola pemikiran konvensional, tanggung jawab pendidikan sering difokuskan hanya pada guru (sekolah). Padahal, menurut hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Surjanti serta peneliti-peneliti lain menunjukkan bahwa lingkungan (keluarga, tetangga, teman, dll.) juga sangat mempengaruhi hasil dari pendidikan itu sendiri. Ini mengindikasikan bahwa guru

(sekolah) bukan satu-satunya pembentuk generasi baru dan penentu perkembangan pendidikan.

Fakta-fakta inilah yang menggiring kebanyakan para pendidik untuk berfikir skeptik dan sinis tentang kebutuhan dan prospek reformasi sekolah (untuk deskripsi kedalaman skeptisisme ini, lihat Farkas dan Johnson, 1996.) Hofstadter (1963, hal 30) dalam tulisannya menyebutkan bahwa sejarah reformasi sekolah merupakan sebuah "sejarah keluhan". Dia menuliskan bahwa ide tentang reformasi sekolah sering dan selalu disangkut-pautkan dengan pembentukan generasi baru di mana seolah-olah tanpa adanya reformasi sekolah, generasi baru tidak dapat terbentuk dengan baik dan sistem pendidikan tidak dapat berkembang.

Beberapa penelitian lain tentang pendidikan mengemukakan bahwa degenerasi moral dan perilaku generasi muda, seperti konsumeristik, hedonisme, dll. sebenarnya tidak memiliki hubungan secara signifikan dengan sekolah (guru). Justru, perilaku ini berhubungan sangat positif dan signifikan dengan gaya hidup dan tingkat kepercayaan diri (psikologi dan emosi) dari siswa

(generasi muda) (Susanti, Iis, dan Handoyo, 2015) (Pranoto dan Hervi, 2010) (Thohiroh Qodaryl, 2015) (Surjanti, 2012). Penelitian-penelitian tersebut membuktikan adanya kesalahan persepsi tentang pendidikan dan sekolah. Sekolah (proses) hanya merupakan bagian dari sistem pendidikan itu sendiri, dan tidak dapat menjamin hasil keseluruhan dari pendidikan itu sendiri.

Dari sekilas dari pembahasan di atas dapat kita tarik sebuah pertanyaan retorik, 'perluakah kita mencari asal dari kesalahan itu?' seperti halnya kita bertanya mana yang lebih dulu ada? Ayam atau telur? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak akan memecahkan maupun menyelesaikan masalah-masalah pendidikan, terutama jika ditujukan untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, peranan dari setiap warga dan semua pihak terkait tidaklah hanya sebagai investigator dan penyelidik tentang permasalahan yang ada pada sistem pendidikan, melainkan juga sebagai aktor atau pelaku aktif dalam usaha pengembangan sistem pendidikan itu sendiri (sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing) berbasiskan *life along education*. Lebih lanjut dalam penelitian

Surjanti, Nugrohoseno, Budiono, & Musfidah (2018) ditemukan sebuah simpulan bahwa perguruan tinggi dan universitas merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki keharusan untuk menyiapkan dan merancang program pendidikan yang kreatif dan inovatif. Rancangan program tersebut haruslah menjawab kebutuhan dari lulusan (kebutuhan kerja), sehingga mereka menjadi siap dalam menghadapi tantangan dunia maju. Sesuai dengan kondisi yang berkembang di mana kewirausahaan menjadi salah satu payung dalam menjamin ekonomi dan kehidupan masyarakat, maka perguruan tinggi hendaklah mendesain program pembelajaran yang berbasis kewirausahaan untuk menyiapkan lulusan agar siap dengan persaingan dunia. Hal ini sejalan dengan program pemerintah tentang perkembangan pendidikan yang menyatakan bahwa universitas dan lembaga pendidikan tinggi memiliki peranan yang penting untuk merekonstruksi kurikulum berdasarkan Kerangka Kerja Kurikulum Nasional 2016 agar dapat memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern.

Buku ini menggambarkan bagaimana pendidikan itu merupakan sebuah kisah yang tiada akhir. Sebuah

gambaran proses yang tidak terhenti dan sampai dengan akhir hayat. Buku ini merupakan sebuah telur dari ide pemikiran tentang bagaimanakan sebenarnya sebuah sekolah yang ideal yang paling tidak dapat mengisi perannya sebagai komponen 'proses' pada sistem pendidikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan Indonesia. Seperti halnya yang tertuang pada buku *Inventing Better School* tentang bagaimana kita 'menyelamatkan' fungsi sekolah melalui buku. Dari pemikiran ini kita dapat membuat sebuah purwarupa dari sebuah sekolah ideal di Indonesia berdasarkan gambaran dari sekolah ideal di Amerika dan 'setting' sekolah ideal dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Buku ini terbagi dalam beberapa poin pembahasan, yakni: (1) pendidikan di Amerika; (2) pendidikan di Philipina; (3) sistem pendidikan di Indonesia; (4) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi abad pengetahuan; serts (5) mengkaji '*Creative Education*' untuk menghadapi abad pengetahuan.

Buku ini juga akan mengulas tentang: 1) *Schools for the 21st Century*, bagaimana pemerintah seharusnya

menjadikan reformasi pendidikan sebagai agenda utama dan dilanjutkan reformasi sekolah; 2) pendidikan yang berorientasi pada 3 (tiga) tujuan dasar, yaitu memupuk cinta Negara, tugas mengajarkan kewarganegaraan dan mengembangkan karakter moral, disiplin diri dan ilmu pengetahuan, teknologi serta kejuruan efisiensi; 3) kondisi yang harus dipersiapkan dalam menghadapi abad pengetahuan: (a) kesiapan dalam menghadapi teknologi dan komunikasi serta (b) kesiapan sekolah: (i) kualitas input, (ii) ide kreatif (model pembelajaran yang melibatkan orang tua dan masyarakat dan orientasi bisnis), (iii) peranan teknologi, dan (iv) sekolah dalam mempersiapkan siswa harus memberikan pengetahuan kerja; 4) upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi abad pengetahuan, yakni dengan (a) meningkatkan profesionalisme guru dalam bidang akademik, teknologi, komunikasi dan bisnis melalui sertifikasi guru, (b) menanamkan nilai-nilai moral dalam keluarga, (c) meningkatkan kualitas pendidikan melalui gerakan *The Motivation to Change* (bahwa perubahan dapat dimotivasi oleh *Long life of education*), (d) meningkatkan kualitas sekolah, dan e) melaksanakan *Creative Education*.

Berdasarkan data dari okezone, pada saat ini terdapat 4 (empat) masalah pendidikan (menurut Namin AB Ibnu Solihin), yang menjadi salah satu faktor penentu kemajuan bangsa, yakni: kurikulum, guru, budaya literasi, dan buku teks pelajaran yang masih menerapkan model *lower order thinking skill* (LOTS).

Keresahan masyarakat terhadap kondisi pendidikan menimbulkan berbagai upaya untuk memperbaiki dan merubah manajemen sekolah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memasukkan unsur pendidikan karakter melalui program PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK) sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan menggalakkan program harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga yang melibatkan dukungan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Urgensi dari gerakan ini adalah:

1. Membangun sumber daya manusia (SDM) sebagai pondasi pembangunan bangsa,

2. Menanamkan keterampilan abad 21 sebagai modal dasar untuk bersaing di generasi global dan untuk mewujudkan Generasi Emas 2045 yang memiliki:
 - a. karakter berkualitas
 - b. keunggulan pada literasi dasar, dan
 - c. kompetensi 4C, yakni: *Critical Thinking and Problem Solving, Creativity, Communication Skills, dan Collaborate Working Ability*
3. menghentikan/menghambat laju degradasi moralitas, etika, dan budi pekerti.

Keperihatinan tentang potensi generasi bangsa ternyata menjadi perhatian yang pertama pada sistem pendidikan. Peningkatan kompetensi yang berdaya saing tinggi dapat diupayakan melalui upaya meningkatkan ketrampilan berfikir kritis, kreatif, komunikasi dan berkemampuan bekerja sama serta berbudi pekerti yang baik.

Amerika merupakan sebuah negara maju yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Menurut poling yang dilakukan oleh Cermati.com, Amerika merupakan

satu dari dua puluh negara di dunia yang memiliki tingkat pendidikan terbaik (Januari 2020). Meskipun demikian, sekarang-sekarang ini, di Amerika, muncul fenomena kecenderungan di mana terjadi penurunan kepercayaan publik pada kemampuan pendidik untuk mengatasi masalah pendidikan sekolah umum tidak disebabkan oleh turunnya atau rendahnya kinerja para pendidik atau rendahnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah di Amerika, melainkan hal tersebut dipicu oleh kegagalan pemimpin Amerika untuk meringkai secara benar masalah yang menimpa sekolah-sekolah tersebut. Sikap defensif dari para pemimpin Amerika ketika menghadapi tuduhan akan isu tentang ketidakmampuan sekolah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern menjadi salah satu penyebab munculnya anggapan di masyarakat tentang rendahnya mutu/kualitas sekolah dan pendidik.

Kondisi tersebut menjadi lebih kompleks ketika dihadapi oleh negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia dan Filipina. Keadaan yang terjadi di Amerika mengindikasikan bahwa peran dan kerjasama pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan tingkat pendidikan sehingga kepercayaan masyarakat akan sistem pendidikan

dapat terbentuk. Dengan tingginya kepercayaan dari masyarakat maka upaya untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang dapat lebih mudah dilaksanakan. Mengacu pada referensi tersebut, kebijakan pendidikan sebaiknya dilaksanakan dengan mensinergikan berbagai komponen dibawahnya.

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan dan renungan untuk membentuk sebuah sekolah yang dapat memenuhi peranannya sebagai komponen dalam sistem pendidikan yang dapat dijadikan pula sebagai titik pijak perubahan antar generasi untuk mempersiapkan generasi millennium.

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan pada abad 21 atau dikenal sebagai abad pengetahuan mensyaratkan adanya kualitas sumber daya manusia yang baik yang meliputi penguasaan sains dan teknologi, terutama teknologi komunikasi, dan dengan pembekalan basic moralitas yang tergalil dari kearifan tradisi-kultural dan nilai-nilai doktrinal agama yang kuat. Pemerintah harus memprioritaskan pendidikan untuk menghadapi tantangan dunia global tersebut, seandainya pemerintah tidak melakukan reformasi pendidikan maka yang terjadi adalah keterpurukan ekonomi dalam percaturan negara-negara secara global di berbagai dimensi yang berdampak pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan harus menjadi agenda utama untuk pembangunan.

Susilo Bambang Yudhoyono, presiden RI keenam, mengatakan bahwa perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia telah mengajarkan bahwa bangsa yang maju, modern, sejahtera, dan bermartabat adalah bangsa yang

memiliki sistem dan praktek pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang unggul dan maju. Pernyataan tersebut didukung sepenuhnya oleh Presiden ketujuh Indonesia, Presiden Joko Widodo yang melalui programnya "Nawacita" mengindikasikan bahwa pendidikan yang bermutu akan sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu yaitu guru yang profesional, sejahtera, dan bermartabat. Dengan peran, multifungsi itu para guru diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan teknologi sekaligus mampu membentuk sikap jiwa dan karakter siswa agar mampu bertahan di era kompetisi yang semakin ketat di abad ke-21 ini.

Memasuki abad 21 atau abad pengetahuan, tatanan pembangunan pendidikan tidaklah semakin ringan karena semakin banyak tantangan yang menguji kesiapan para generasi baru untuk menjawab perkembangan tersebut. Paradigma perkembangan system pendidikan menjadi semakin kompleks. Konsekuensinya penyelenggaraan pendidikan menuntut adanya perubahan yang mendasar pada tiap komponen-komponen pada sistem pendidikan,

termasuk diantaranya adalah guru dan sekolah. Sosok guru di abad pengetahuan harus ditandai dengan keteguhan iman dan taqwa, tingginya semangat nasionalisme, ⁴⁸ penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta wawasan yang jauh ke depan. Guru menjadi tokoh sentral yang membawa arah laju masa depan bangsa.

Mutu guru dapat terlihat dari bagaimana karakter dan kemampuan guru untuk berfikir sistematis, ilmiah dan rasional. Pembentukan guru diawali dari dibangunnya profesionalisme dan karakter building dari lembaga pendidikan guru dikembangkan melalui lembaga profesionalisme guru dan didukung oleh lingkungan internal dan eksternal guru. Sosok guru di abad pengetahuan tidak hanya harus ditandai dengan penguasaan keterampilan dan keahlian pada ilmu pengetahuan, teknolog, dan komunikasi, tetapi juga harus diiringi dengan kekuatan moralitas, keteguhan iman dan taqwa, semangat nasionalisme, serta wawasan tentang masa depan. Karena itulah paradigma pendidikan di abad 21 menuntut perubahan pada peran guru.

Tetapi bagaimanakah kondisi pendidikan di Indonesia yang sesungguhnya terjadi sekarang? Apakah retorika tersebut sesuai dengan harapan? Lalu apa yang harus dilakukan agar harapan-harapan tersebut dapat terlaksana? Untuk merespon semua pertanyaan tersebut, sebuah reformasi secara menyeluruh perlu untuk dilakukan. Sebuah reformasi yang menyangkut semua komponen pada sistem pendidikan, yang dimulai dari input, proses, lingkungan, dan output dari sistem pendidikan itu sendiri.

Di negara maju, salah satunya di Amerika, guru menjadi titik pijak untuk melihat bagaimana kesuksesan sebuah pendidikan. Guru harus memiliki standar kualifikasi yang harus bias memenuhi kebutuhan pendidikan. Lalu, bagaimana situasi guru di Indonesia? Apakah standar tersebut telah terpenuhi? Pemerintah telah berusaha untuk memenuhi standar tersebut dengan berbagai macam cara, salah satunya melalui sertifikasi guru. Tetapi benarkah pelaksanaan sertifikasi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal? Pertanyaan tersebut tetap menggema dan masih belum dapat terjawab

sepenuhnya. Sehubungan dengan profesionalisme guru, telah banyak kajian yang dilakukan oleh para ahli, diantaranya adalah Stiles dan Horsley (1998) serta NRC (1996).

Pada abad 21, proses pendidikan dan pembelajaran lebih ditekankan pada bagaimana siswa belajar (Dellors, 2007). Dia menyebutkan bahwa belajar merupakan sebuah proses untuk mengetahui (to know), berbuat (to do), menjadi (to be), dan hidup bersama (to live together). Sekolah sebagai komponen 'proses' pada sistem pendidikan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan. Perubahan tersebut harus mencakup semua unsur dan elemen yang terkandung di dalamnya, yaitu guru, kurikulum, siswa, sarana dan prasarana. Mukminin (2003) menyebutkan bahwa selama ini pendidikan nasional sering mengenyampingkan banyak hal yang pada kenyataannya akan mempengaruhi kemajuan Pendidikan itu sendiri.

Masalah utama pembangunan nasional sebenarnya dapat terselesaikan melalui peran universitas, yaitu salah satunya dengan merekonstruksi kurikulum (berdasarkan

Kerangka Kerja Kurikulum Nasional Indonesia 2016) untuk menjawab kebutuhan persaingan dunia dewasa (melalui kewirausahaan) (Surjanti, Nugrohoseno, et al., 2018). Selain itu, dengan menumbuhkan *self-efficacy* pada peserta didik, perilaku berkelanjutan dapat terbentuk yang selanjutnya dapat mempengaruhi kemajuan sistem pendidikan itu sendiri (Surjanti, Soejoto, Seno, & Waspodo, 2020).

Buku ini mengkaji literatur dari buku *Eventing Better School* yaitu tentang penemuan sekolah terbaik di Amerika, yaitu tentang kajian kondisi sistem pendidikan, bagaimana menyelesaikan keterpurukan atau krisis di bidang pendidikan yang selanjutnya dapat diterapkan sebagai perbandingan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai pembanding, buku *Education for a Sustainable Future (a paradigm of Hope for the 21st Century)* oleh Jack Byrne pun dikaji sebagai acuan gambaran untuk melihat bagaimana men-setting pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi abad pengetahuan.

BAB II

PENDIDIKAN ABAD PENGETAHUAN

Untuk menciptakan pendidikan yang modern dan profesional diperlukan dukungan dan tanggung jawab pemerintah yang memiliki otoritas tertinggi, melalui kebijakan yang diatur dalam bidang pendidikan, yang selanjutnya diserahkan pada lembaga pendidikan sebagai pengelola pendidikan. Lembaga pendidikan diharapkan mampu mengeluarkan output yang diharapkan pada abad pengetahuan, tentunya dilakukan dengan cara memberikan fasilitas dan pembelajaran yang berorientasi pada IPTEK. Lembaga pendidikan mengemas dalam suatu kurikulum yang terstandarisasi untuk menghadapi abad pengetahuan. Selain itu diperlukan berbagai pendukung sistem yang memiliki kompetensi (di bidang masing-masing) untuk membantu pelaku-pelaku pendidikan, antara lain guru, siswa, pengelola, tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dll.

Dalam membentuk SDM yang berkualitas maka dipengaruhi UU, teknologi, komunikasi, *life skill*, norma,

etika dan budaya dan lingkungan bisnis, yang dapat diamati pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya SDM berkualitas

Pendidikan mempunyai peranan yang strategis untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki keberdayaan dan kecerdasan emosional yang tinggi dan menguasai megaskills yang mantap. Untuk itu, lembaga pendidikan dalam berbagai jenis dan jenjang memerlukan pencerahan dan pemberdayaan dalam berbagai aspeknya. Praktek pembelajaran yang terjadi sekarang masih didominasi oleh paradigma yang banyak dijumpai di abad industri. Padahal

pada kenyataannya, abad pengetahuan memiliki paradigma yang jauh berbeda dengan abad industri. Galbreath (1999) mengemukakan bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan pada abad pengetahuan adalah pendekatan campuran yaitu perpaduan antara pendekatan belajar dari guru, belajar dari siswa lain, dan belajar pada diri sendiri. Perbandingan ini merefleksikan pandangan filosofis tentang teknologi (pendidikan), terutama antara pandangan modern dan pandangan transformatif (Trilling dan Hood, 1999).

Profesionalisme guru pada abad pengetahuan

Sekarang ini, kita hidup di abad 21. Para peramal masa depan (*futurist*) mengatakan abad ini sebagai abad pengetahuan karena pengetahuan menjadi landasan utama dari segala aspek kehidupan (Trilling dan Hood, 1999). Abad pengetahuan merupakan suatu era dengan tuntutan yang lebih rumit dan menantang. Suatu era dengan spesifikasi tertentu yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap dunia pendidikan dan lapangan kerja. Perubahan-perubahan tersebut terjadi selain dikarenakan sangat pesatnya perkembangan IPTEK, juga diakibatkan

oleh semakin meluasnya transformasi dari perkembangan IPTEK itu sendiri, yang menyakup berbagai bidang kehidupan. Dampaknya, muncullah perubahan cara pandang manusia terhadap aspek kehidupan, salah satunya di bidang pendidikan, seperti perubahan peran orang tua/guru/dosen, serta perubahan pola hubungan antar mereka. Trilling dan Hood (1999) mengemukakan bahwa perhatian utama pendidikan di abad 21 adalah bagaimana cara untuk mempersiapkan hidup dan kerja bagi masyarakat.

Tibalah saatnya menoleh sejenak ke arah pandangan dengan sudut yang luas mengenai peran utama yang akan semakin dimainkan oleh pembelajaran dan pendidikan dalam masyarakat yang berbasis pengetahuan. Tahapan kesiapan orang tua, guru dan dosen dalam menghadapi abad pengetahuan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Kesiapan Orang tua, guru, dan dosen dalam menghadapi abad pengetahuan

15

Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maister mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan IPTEK dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.

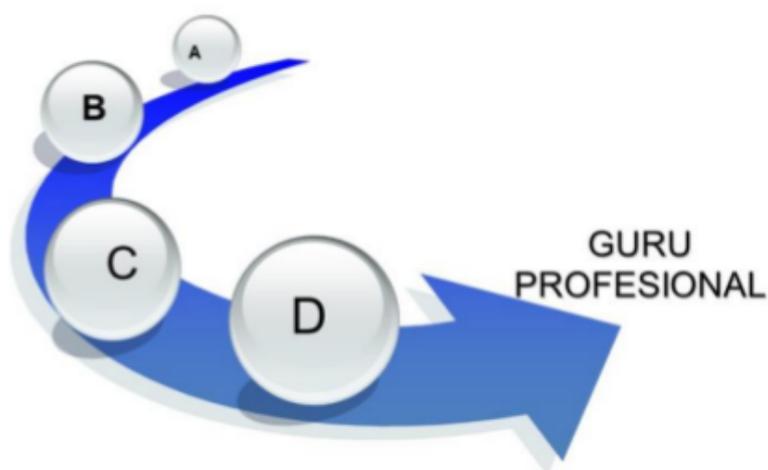
3

Memperhatikan kualitas guru di Indonesia memang jauh berbeda dengan dengan guru-guru yang ada di Amerika Serikat atau di negara-negara maju lainnya, seperti Inggris, Jepang, dan Singapura. Di Amerika Serikat,

7

guru profesional harus memenuhi empat standar pengembangan profesionalitas guru sesuai dengan ide dari Stiles dan Horsley (1998) serta NRC (1996) yaitu; (A) pengembangan standar profesionalitas untuk guru yang mana memerlukan pembelajaran isi melalui perspektif-perspektif dan metode-metode inquiri; (B) pengembangan standar profesionalitas untuk guru yang mana memerlukan pengintegrasian ilmu pengetahuan, kegiatan pembelajaran, pendidikan, dan siswa. Pada standar ini, guru tidak hanya harus mengetahui sains tetapi juga harus mengetahui bagaimana cara mengajarkannya melalui konsep-konsep yang penting sehingga dapat membantu siswa belajar dan menguasai materi yang diajarkan; (C) pengembangan standar profesionalitas untuk guru yang memerlukan pembentukan pemahaman dan kemampuan untuk pembelajaran sepanjang masa. Dalam standar ini, guru diminta untuk memahami alasan mengapa mereka memilih profesi ini. Mereka juga diharuskan untuk memiliki niat serta komitmen untuk terus belajar; dan (D) pengembangan standar profesionalitas untuk guru yang menunjukkan koherenitas (keberkaitan) dan kohesi (keterpaduan). Standar ini dimaksudkan untuk menangkal

kecenderungan kemunculan pengembangan profesi yang terfragmentasi dan tidak berkelanjutan. Selanjutnya, standar profesionalisme guru di Amerika dapat terlihat sebagai berikut:



Gambar 3. Standar Profesionalisme Guru di Amerika

³ Apabila guru di Indonesia telah memenuhi standar profesional guru sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat maka kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia semakin baik. Selain memiliki standar profesional guru sebagaimana uraian di atas, di Amerika Serikat ³ menjadi profesional seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal, yakni: (1) komitmen pada siswa dan proses belajarnya, (2) penguasaan secara mendalam bahan/mata pelajaran yang

diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa, (3) tanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, (4) cara berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, dan (5) kesadaran akan peranannya sebagai bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya (Supriadi, 1998). Arifin (2000) mengemukakan guru Indonesia yang profesional dipersyaratkan mempunyai: (1) dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21; (2) penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka.

Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia; (3) pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan, profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktek pendidikan. Kekerdilan profesi guru dan ilmu pendidikan disebabkan terputusnya program pre-

service dan in-service karena pertimbangan birokratis yang kaku atau manajemen pendidikan yang lemah.

Dengan adanya persyaratan profesionalisme guru ini, perlu adanya paradigma baru untuk melahirkan profil guru Indonesia yang profesional di abad 21 yaitu; (1) memiliki kepribadian yang matang dan berkembang; (2) penguasaan ilmu yang kuat; (3) keterampilan untuk membangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi; dan (4) pengembangan profesi secara berkesinambungan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dan ditambah dengan usaha lain yang ikut mempengaruhi perkembangan profesi guru yang profesional.

³ Dimensi lain dari pola pembinaan profesi guru adalah (1) hubungan erat antara perguruan tinggi dengan pembinaan SLTA; (2) meningkatkan bentuk rekrutmen calon guru; (3) program penataran yang dikaitkan dengan praktik lapangan; (4) meningkatkan mutu pendidikan calon pendidik; (5) pelaksanaan supervisi; (6) peningkatan mutu manajemen pendidikan berdasarkan *Total Quality Management* (TQM); (7) melibatkan peserta serta

masyarakat berdasarkan konsep *link and match*; (8) pemberdayaan buku teks dan alat-alat pendidikan penunjang; (9) pengakuan masyarakat terhadap profesi guru; (10) perlunya pengukuhan program Akta Mengajar melalui peraturan perundangan; dan (11) kompetisi profesional yang positif dengan pemberian kesejahteraan yang layak.

1
Apabila syarat-syarat profesionalisme guru di atas itu terpenuhi akan mengubah peran guru yang tadinya pasif menjadi guru yang kreatif dan dinamis. Hal ini sejalan dengan pendapat Semiawan (1991) bahwa pemenuhan persyaratan guru profesional akan mengubah peran guru yang semula sebagai orator yang verbalistis menjadi berkekuatan dinamis dalam menciptakan suatu suasana dan lingkungan belajar yang *invited learning environment*. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, guru memiliki multi fungsi yaitu sebagai fasilitator, motivator, informator, komunikator, transformator, *change agent*, inovator, konselor, evaluator, dan administrator (Soewondo, 1972 dalam Arifin 2000).

Pengembangan profesionalisme guru

Profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Tugas mulia itu menjadi berat karena bukan saja guru harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan juga harus mempersiapkan profesionalisme diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai profesional.

Faktor-faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru kondisi pendidikan nasional kita memang tidak secerah di negara-negara maju. Baik institusi maupun isinya masih memerlukan perhatian ekstra pemerintah maupun masyarakat. Dalam pendidikan formal, selain ada

kemajemukan peserta, institusi yang cukup mapan, dan kepercayaan masyarakat yang kuat, juga merupakan tempat bertemunya bibit-bibit unggul yang sedang tumbuh dan perlu penyemaian yang baik. Pekerjaan penyemaian yang baik itu adalah pekerjaan seorang guru. Jadi guru memiliki peran utama dalam sistem pendidikan nasional khususnya.

Seperti yang diuraikan di atas, untuk melihat perbedaan dan kemiripan pelaksanaan pembelajaran antara abad industri dan pengetahuan, berikut ini dapat kita lihat perbandingan pelaksanaan pembelajaran di abad industri dan abad pengetahuan.

9
Tabel 1. Belajar Abad Pengetahuan versus Abad Industrial

<i>Industrial Age</i>		<i>Knowledge Age</i>	
<i>Teacher-as-Director</i>	<i>Guru sebagai pengarah</i>	<i>Teacher-as-Facilitator, Guide, Consultant</i>	<i>Guru sebagai fasilitator, pembimbing, konsultan penasehat, kawan sebaya dan diri sendiri.</i>
<i>Teacher-as-Knowledge Source</i>	<i>Guru sebagai sumber</i>	<i>Teacher-as-Co-learner</i>	<i>Guru sebagai kawan belajar</i>

Titik Balik "PENDIDIKAN" Kisab Tiada Akhir

	<i>pengetahuan</i>		
<i>Curriculum-directed Learning</i>	<i>Belajar diarahkan oleh kurikulum</i>	<i>Student-directed Learning</i>	<i>Belajar diarahkan oleh siswa</i>
<i>Time-slotted, Rigidly Scheduled Learning</i>	<i>Belajar dijadualkan secara ketat dgn waktu yang terbatas</i>	<i>Open, Flexible, On-demand Learning</i>	<i>Belajar secara terbuka, ketat dgn waktu yang terbatas fleksibel sesuai keperluan</i>
<i>Primarily Fact-based</i>	<i>Terutama didasarkan pada fakta</i>	<i>Primarily Project- & Problem-based</i>	<i>Terutama berdasarkan proyek dan masalah</i>
<i>Theoretical, Abstract</i>	<i>Bersifat teoritik, prinsip- prinsip dan survei</i>	<i>Real-world, concrete</i>	<i>Dunia nyata, dan refleksi prinsip dan survei</i>
<i>Principles & Survey</i>	<i>Penelitian dan prinsip</i>	<i>Actions & Reflections</i>	<i>Penyelidikan dan perancangan</i>
<i>Drill & Practice</i>	<i>Pengulangan dan latihan</i>	<i>Inquiry & Design</i>	<i>Penemuan dan penciptaan</i>
<i>Rules & Procedures</i>	<i>Prosedur dan aturan</i>	<i>Discovery & Invention</i>	<i>Penemuan dan penemuan</i>
<i>Competitive</i>	<i>Kompetitif</i>	<i>Collaborative</i>	<i>Colaboratif</i>
<i>Classroom-focused</i>	<i>Berfokus pada kelas</i>	<i>Community-focused</i>	<i>Berfokus pada masyarakat</i>

Titik Balik “PENDIDIKAN” Kisab Tiada Akhir

<i>Prescribed Results</i>	<i>Hasilnya ditentukan sebelumnya</i>	<i>Open-ended Results</i>	<i>Hasilnya terbuka</i>
<i>Conform to Norm</i>	<i>Mengikuti norma</i>	<i>Creative Diversity</i>	<i>Keanekaragaman yang kreatif</i>
<i>Computers-as-Subject of Study</i>	<i>Komputer sbg subyek belajar</i>	<i>Computers-as-Tool for all Learning</i>	<i>Komputer sebagai peralatan semua jenis belajar</i>
<i>Static Media Presentations</i>	<i>Presentasi dgn media statis</i>	<i>Dynamic Multimedia Interactions</i>	<i>Interaksi multi media yang dinamis</i>
<i>Classroom-bounded Communication</i>	<i>Kesatuan komunikasi dan kelas</i>	<i>Worldwide-unbounded Communication</i>	<i>Komunikasi tidak terbatas ke seluruh dunia</i>
<i>Test-assessed by Norms</i>	<i>Tes diukur dengan norma</i>	<i>Performance-assessed by Expert, Mentors, Peers & Self</i>	<i>Unjuk kerja diukur oleh pakar,</i>

Sumber : Galbreath (1999)

Berdasarkan data di atas dapat dicermati bahwa paradigma pembelajaran di kelas pun sudah harus berubah dengan latar belakang guru bukan satu-satunya sumber (*teacher-centered*) tetapi guru sebagai teman yang

mengarahkan (*student-centered*), belajar fleksibel tidak terikat oleh kelas, pembelajaran lebih mengarah ke penyelesaian proyek pada kasus dunia nyata, selanjutnya dipecahkan bersama secara kolaboratif dengan cara melakukan penelitian-penelitian dan penemuan dan selanjutnya secara bersama-sama dirancang menjadi penemuan dan disampaikan secara terbuka, menggunakan berbagai multimedia sebagai alat bantu dan diharapkan berguna dan memberikan manfaat untuk siswa. Model pembelajaran pada abad 21 dirancang dengan berbagai pendekatan yang sesuai. Salah satu media pembelajaran modern adalah *e-mobile*. *E-mobile*, sebuah sistem jaringan informasi, tidak lagi hanya memenuhi fungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga ia juga dapat berfungsi sebagai media pembelajaran (Surjanti, Seno, et al., 2018) melalui *m-learning*, *v-learning*, *microblog*, *twitter*, *facebook*, *whatsapp*, dan *google classroom* (Surjanti, Sakti, & Fitrayati, 2020)

BAB III

PENDIDIKAN DI AMERIKA

Sejarah Perkembangan Pendidikan di Amerika

Pendidikan adalah permasalahan yang tiada akhir, tentunya tidak terlepas bagaimana perkembangan yang telah terjadi pada masing-masing Negara tampaknya berbeda. Amerika pun juga mengalami pasang surutnya pendidikan. Demikian juga dengan pendidikan di Philipina dan di Indonesia khususnya. Marilah kita amati perkembangan pendidikan Amerika, dari berbagai masa.

1. Masa Keemasan

Adakah yang percaya ketika kita mengatakan bahwa masa lalu berlangsung baik-baik saja, berjalan dengan indah tanpa gelombang? Tentulah tidak! Sekarang kita tengok perjalanan pendidikan di Amerika di masa lalu.

Periode 1870, di masa ini, Sekolah Dasar ditangani oleh guru yang tidak trampil. Anak-anak hanya diberi pengetahuan saja. Mereka meninggalkan sekolah untuk

kehidupan luas tanpa disiplin; tanpa kekuatan mental. Guru dihadapkan pada kondisi kemiskinan, tidak hanya itu, sekolah juga mengalami kondisi yang serupa dan ini terjadi hamper di seluruh pelosok negeri. Banyak sekali sekolah yang harus ditutup karena mereka tidak lagi mampu untuk beroperasi. Lalu bagaimana dengan murid-muridnya? Tentulah sulit bagi sekolah-sekolah tersebut untuk menjamin proses pembelajaran, alhasil banyak siswa yang ada di ratusan sekolah Amerika menjadi tidak disiplin dan kurang dalam penguasaan pengetahuan (Phelps, 1870, hlm. 13, 17).

Periode tahun 1889, 335 dari 400 perguruan tinggi menemukan bahwa mahasiswa baru yang masuk mempunyai kemampuan yang kurang sehingga mereka harus mendirikan departemen khusus untuk persiapan dan para calon mahasiswa menghadapi tuntutan di perguruan tinggi.

Periode 1892, pada periode ini, anak laki-laki harus melakukan sedikit pekerjaan di sekolah. Mereka tidak dibujuk, tetapi dipaksa pada situasi harus mengeja, menulis dan berhitung. Mereka harus melakukan hal itu

tanpa memiliki pilihan ketika mereka seharusnya belajar. Tetapi untungnya pada periode ini, ada banyak lembaga/komisi/organisasi yang menunjukkan peran serta dalam mengawasi proses pada pendidikan dasar ini, sehingga anak-anak dapat terus belajar sesuai dengan apa yang mereka harapkan. (New York Sun, 1892, dilaporkan dalam Valentine, 1952, hal 354).

Periode 1931, satu hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi, pada periode ini Amerika berada di tengah-tengah ketidakpastian pendidikan yang besar. Pihak Konservatif yang mendorong pemerintah dan masyarakat untuk kembali ke standar dan praktek pendidikan yang radikal dan mengkritik kondisi yang sedang berlangsung. Pihak Konservatif sangat tidak setuju dan tidak puas mengenai hal-hal yang tengah terjadi ketika itu. Tidak hanya masalah metode atau hasil pendidikan, tetapi juga cita-cita dan tujuan yang menjadi dasarnya [Dewey, 1931, hal 1].

Periode tahun 1941, Naval Officers Training Corps melaporkan bahwa 62% dari 4.200 siswa yang diuji gagal untuk lulus ujian matematika dasar penalaran. Hal

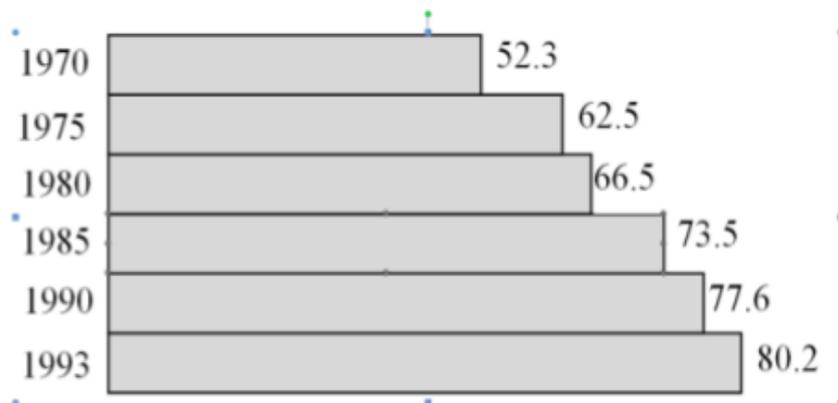
ini menunjukkan bahwa tingkat penguasaan mereka akan ilmu pengetahuan dan pendidikan sangat tidak cukup.

Periode tahun 1945, hanya empat dari sepuluh orang Amerika yang masuk sekolah dan mampu menyelesaikan sekolah tinggi dalam waktu empat tahun.

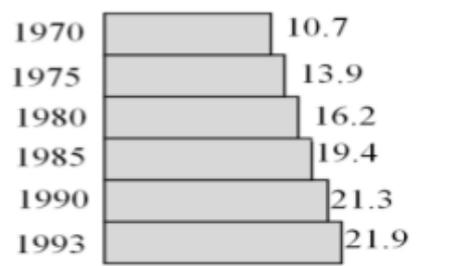
Periode tahun 1948, lebih dari delapan dari sepuluh penduduk usia sekolah berhasil menyelesaikan sekolah menengah. Kebanyakan dari mereka lebih banyak yang langsung bekerja.

Periode tahun 1954, 62 persen dari perguruan tinggi negeri masih merasa perlu untuk mengajar aljabar untuk siswa baru.

Berikut merupakan grafik dari peningkatan lulusan (data diperoleh dari Sensus Amerika Serikat 1995)



Gambar: 1: Pencapaian pendidikan yang lebih baik



Gambar: 2. Melek Huruf

- Meskipun dalam hal tingkat keaksaraan (melek huruf), Amerika secara substansial kurang daripada yang diharapkan, namun Amerika jelas menjadi yang terbaik di antara Negara-negara lain dalam hal jumlah orang dewasa yang melek huruf. Buta aksara telah benar-benar telah dieliminasi. Hampir semua orang Amerika dapat membaca (lihat Gambar 1.2). Sayangnya, banyak

(mungkin 50% atau lebih) masih tidak membaca dengan baik.

- Beberapa waktu lalu, banyak orang Amerika tidak bisa membaca sama sekali dan banyak juga yang tidak bisa membaca dengan baik. Fakta ini jelas tercermin dalam cara US Army pergi tentang pengujian direktur dalam Perang Dunia I. Pada saat itu dikembangkan dua model tes intelegensi, satu untuk mereka yang melek huruf dan satu untuk mereka yang buta huruf.

Faktanya adalah bahwa tidak hanya keberhasilan yang dapat dicapai oleh Sekolah-sekolah Amerika, tetapi juga catatan-catatan buruk, tetapi setidaknya ada hal baik pernah ada.

Phillip C. Schlechty, seorang presiden dan CEO dari Pusat Reformasi Kepemimpinan di Sekolah serta penulis *Schools for the 21st Century*, menyatakan bahwa adanya keharusan untuk reformasi pendidikan dan pengajaran dan perilaku sosial berdasar pada teori organisasi instruksi serta berbagai publikasi lainnya.

In *Schools for the 21st Century*, sekolah didorong untuk melakukan reformasi. Masyarakat dan budaya keharusan bagi reformasi sekolah. Keharusan ini bahkan lebih penting bagi mereka yang menghargai demokrasi dan ingin menghindari disintegrasi lebih jauh dari tatanan moral masyarakat Amerika. Pengetahuan tidak hanya penting bagi perekonomian, tetapi untuk semua aspek lain pada pemerintahan, seperti pertahanan dan kesehatan. Oleh karenanya, kita semua perlu dan wajib memiliki kemampuan untuk bekerja pada dan dengan informasi, serta mampu untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan dapat digunakan, sehingga kita dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk memecahkan masalah, menghasilkan kenikmatan estetika dan artistik penghargaan, memperkaya sipil dialog dan wacana, dan meningkatkan kualitas kehidupan. Imperatif teknologi sama pentingnya dengan ekonomi, kemasyarakatan, dan budaya imperatif. Sekolah dalam mempersiapkan siswa harus memberikan pengetahuan kerja, antara lain:

- a. Belajar aktif, melalui kurikulum.
- b. Guru sebagai Pemimpin dan Penemu

- c. Pengetahuan Kerja sebagai Product of Sekolah
- d. Retreat dan Ritual Kepatuhan
- e. Erosi Tradisional Authority
- f. Mahasiswa sebagai Pelanggan
- g. Belajar sebagai Konsekuensi
- h. Penjualan Versus Pemasaran

Siswa harus terlibat di sekolah, apa yang dibutuhkan adalah pendekatan pemasaran. Pendidik harus bertanya, Apa yang perlu dilakukan siswa yang dapat dipenuhi oleh pekerjaan yang kita tawarkan? Apa pekerjaan baru yang mungkin kita menemukan atau membuat sehingga dapat memenuhi kebutuhan ini lebih baik? Bagaimana saya dapat memotivasi siswa? pendidik harus bertanya, Apa yang memotivasi siswa khusus ini, dan bagaimana saya bisa hadir atau pekerjaan desain yang merespons motivasi ini? Singkatnya, sekolah harus dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dipandang sebagai pelanggan, pekerjaan mereka disediakan dipandang sebagai produk sekolah, dan pemasaran-sebagai lawan dari penjualan dipandang sebagai kerangka kerja. Guru kreatif dan inventif saat ini beroperasi di sekolah-sekolah secara intuitif (bahkan tak

jarang dilakukan secara sadar) melihat siswa sebagai pelanggan. Sayangnya, banyak guru tampak enggan untuk mengakui bahwa siswa memiliki kekuatan semua pelanggan memiliki, yakni kekuatan pilihan. Kondisi ini tidak disadari guru di Indonesia umumnya, seolah-olah apa yang ditawarkan sekolah atau apapun yang diberikan guru itulah layanan pendidikan yang harus diterima, bukan menjadi suatu pilihan.

2. Masalah Kualitas

Ketika mahasiswa dianggap sebagai pelanggan dan pengetahuan bekerja dianggap sebagai produk sekolah, masalah Reframed. TQM menjadi sebuah kata kunci di dalam gerakan pengembangan kualitas pendidikan di sekolah (Deming, 1986 dan Crosby, 1979). Pada reformasi pendidikan di Amerika, terdapat beberapa hal yang dapat diulas antara lain:

- a. Kualitas input di Perguruan Tinggi,
- b. Ide Kreatif
- c. Diperlukan sinergi pendidikan dari orang tua, sekolah, perpustakaan, koran lokal, dan lembaga keagamaan dan masyarakat. Lebih jauh lagi, masyarakat berfungsi

sebagai control dalam pendidikan. Willard Wailer ([1932] 1967, p. 34) pernah menggambarkan sekolah sebagai "museum kebajikan".

- d. Peranan teknologi.
- e. Perbaikan sekolah dan pembaharuan sekolah tidak cukup, tetapi peranan pendidik/guru.
- f. Perbaikan sistem sekolah, bahwa sekolah dan kelas, yang merupakan perubahan fokus yang tepat, adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Robert Dreeben melalui pengamatannya menuliskan bahwa adanya ironisasi dan asosiasi antara keakraban dengan sekolah dan ketidaktahuan kita.

Dari reformasi tersebut, pemerintah Amerika melakukan usaha untuk 'menanggulangi' kondisi dengan melakukan gerakan yang dikenal sebagai *The Motivation to Change*, perubahan itu biasanya dimotivasi oleh salah satu dari dua kondisi:

- a. Perubahan adalah wajib bagi kelangsungan hidup.
- b. Visi sangat menarik dan menarik sehingga pelestarian status quo dan keamanan pengaturan sekarang pucat signifikansi. Ancaman tanpa visi menciptakan

ketakutan, sikap bertahan, dan mentalitas pengepungan. Ancaman nyata ditambah dengan visi yang positif tentang masa depan dapat membuat komitmen dan semangat, dua bahan-bahan yang harus ada jika perubahan yang akan dipertahankan.

- c. Ekuitas keuangan dan Reformasi Sekolah, Jonathan Kozol setuju dan menyatakan bahwa jika tidak memadainya/tercukupinya uang untuk meningkatkan pendidikan, penduduk miskin di tiap daerah setidaknya harus memiliki kesempatan yang sama untuk tidak menjadi kecewa oleh kegagalan (1991, hal 169).
- d. Dewasa ini adalah biasa untuk menggunakan teknologi kata sebagai sinonim untuk pemrosesan informasi elektronik dan/atau transmisi informasi teknologi.
- e. Memahami sekolah sebagai suatu Business, Peter Drucker (1974) menyarankan tiga pertanyaan yang pemimpin organisasi harus terus-menerus bertanya tentang diri mereka sendiri dan dari orang-orang yang dipimpinnya:
 - 1) Bisnis apa yang ingin dilakukan?

- 2) Siapa pelanggan kami, dan apa kebutuhan yang mereka punya bisnis kami bisa menanggapi?
- 3) Apa produk atau produk yang kita miliki dengan yang untuk menanggapi kebutuhan pelanggan kami, dan apa produk tambahan mungkin kita produksi, mengingat bisnis kita berada dalam?

Pemimpin harus siap untuk memahami teknologi baru dan mungkin melihat bahwa ancaman teknologi baru daripada sumber daya. Pendidik telah menetapkan bisnis mereka dalam berbagai cara, misalnya, sebagai usaha untuk mendidik anak-anak, usaha untuk mengembangkan potensi setiap anak, bisnis pencerahan, atau transmisi budaya bisnis kenyaannya bahwa bisnis utama sekolah adalah transmisi, pemeliharaan, dan pengolahan. Bisnis dan teknologi inti sekolah

- f. Reaksi perubahan teknologi (*Technological Change Reaction*), untuk menghindari kepunahan, organisasi tidak mempunyai pilihan lain selain beradaptasi dengan teknologi baru. Sekolah, Pendidikan, dan Informasi.

- g. Pengetahuan Kebutuhan Pekerja, seorang pekerja harus mempunyai pengetahuan untuk menggunakan fakta-fakta, ide, teori, keyakinan, dan seharusnya bentuk-bentuk pengetahuan untuk menghasilkan suatu produk. Dalam sekolah harus diberikan pengetahuan untuk bekerja.

Lebih lanjut, untuk menjabarkan situasi di atas, lima deskriptor berikut digunakan untuk menetapkan kualitas pekerjaan pengetahuan dalam konteks sekolah:

- a. Melibatkan siswa tanpa adanya paksaan.
- b. Memiliki standar untuk hasil/produk pembelajaran.
- c. Menantang siswa untuk berhasil dalam proses pendidikan dan merasa senang dengan proses tersebut.
- d. Mencapai keberhasilan pembelajaran (guru dan siswa).
- e. Memenuhi standar nilai hasil belajar siswa (orang tua dan masyarakat).

Dalam buku *Education for a Sustainable Future*, Jack Byrne (2000:35) menjelaskan bahwa reformasi

pendidikan di Amerika dilakukan dengan cara merancang pendidikan, sebagai berikut:

1. Aktif belajar untuk penelitian mereka sendiri, dengan populasi beragam, konsep-konsep umum terbaik pelajari dalam berbagai konteks yang menggambarkan konsep-konsep.
2. Full strategi pada tingkatan pendidikan, yang berusaha memahami keahlian anak.
3. Komunikasi. Belajar untuk berkomunikasi dan mengajarkan ide-ide dengan jelas.
4. Melibatkan orang tua dan orang dewasa di rumah dalam pendidikan siswa merupakan cara yang penting untuk meningkatkan pembelajaran
5. Menggunakan produk berbasis teknologi dan on-line dan off-line dalam kegiatan pembelajaran, untuk menguatkan.
6. *Link* komunitas, siswa dapat belajar banyak sekali dari bisnis, lembaga pemerintah kelompok masyarakat, tempat ibadah, dll.

Ada 9 sekolah yang kita kunjungi disini terdiri dari Kinder Garden (TK), Elementry School (SD), Middle School (SMP), High School (SMA). Di sekolah kita

6
melakukan observasi tentang semua component yang ada di sekolah, mulai dari SDM, fasilitas, management sekolah, wawancara dengan Kepala sekolah dan wakil, guru mata pelajaran, konseling, pegawai, student dan orang tua siswa/komite, pengawas dan melihat secara langsung proses pembelajaran semua mata pelajaran (*math, science, language & art, social, music, sport*) dan kegiatan ekstra kurikuler.

Pada kesempatan ini saya akan menulis gambaran tentang sekolah dasar (*Elementry school*) di luar negeri, khususnya di Amerika. Sekolah dasar di sini, terintegrasi satu atap dengan TK. Sekolah Dasar dimulai dengan Pre school (TK) satu tahun kemudian dilanjutkan dengan kelas (grade) 1 sampai dengan 5, jadi sekolah dasar tetap berlangsung selama 6 tahun. Melihat proses belajar mengajar di sekolah dasar di Amerika memang sangat menarik karena kondisinya sangat jauh berbeda dengan sekolah dasar yang ada di Negara kita, Indonesia. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari; satu Fasilitas. Fasilitas di sekolah dasar (di Amerika) sangat lengkap, setiap kelas dilengkapi dengan komputer (min. 5 buah) untuk siswa, laptop untuk guru, Infocus, OHP. TV,

perpustakaan (rak buku) kecil yang lengkap dengan buku buku sumber yang dipakai dalam, locker, meja belajar, dan kursi yang didesain dengan baik sehingga ruang tidak terlalu padat, di depan papan tulis terbentang karpet kecil, yang digunakan sewaktu guru menyajikan materi/ menanamkan konsep, siswa boleh duduk dikarpet, sehingga betul betul bisa membuat anak menikmati proses belajar (*enjoyful learning*). Jumlah siswa dala satu kelas dibatasi menjadi sekitar 20 atau 22 per kelas. Dengan sistem pindah kelas (*moving kelas*) di mana siswa yang harus berpindah kelas setiap pertukaran mata pelajaran, sedangkan guru tetap berada di kelas masing-masing, misalnya guru matematika akan selalu berada selalu di kelas yang sama (misal kelas matematika 1), jadi mereka akan bertanggungjawab terhadap kondisi kelas tersebut.

Guru disini berfungsi sebagai fasilitator, setiap materi yang akan dipelajari hari besok akan diberi tugas oleh guru hari ini, setiap hari tugas tersebut sudah ditulis di papan. Anak-anak (siswa) dapat langsung mencatat atau menulis kembali apa yang harus dikerjakannya di rumah. Tugas yang diberikan dapat berupa bacaan, pertanyaan, latihan, atau mencari informasi tambahan dari internet

6

atau sumber lain tentang materi (pelajaran) yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya. Kondisi ini akan mengharuskan siswa untuk membaca dan belajar di rumah sebelum pelajaran diajarkan. Konsep ini disebut sebagai *inquiry concept* atau konsep di mana siswa/anak harus menemukan sendiri informasi yang mereka perlukan. Sehingga guru tinggal mendiskusikan dan membahas materi/informasi yang telah diperoleh siswa sebelumnya. Kegiatan pembelajaran di kelas akan menjadi aktif.

Bagaimana kalau oleh siswa yang tidak mengerjakan tugas/belajar materi yang telah diberikan di hari sebelumnya? Siswa yang seperti ini akan dikeluarkan dari ruang kelas dan diminta untuk mengerjakan tugasnya di perpustakaan. Begitu juga untuk anak yang agak lemah, guru akan memberikan tambahan belajar di luar jam pelajaran secara gratis. Jadi disini anak-anak memang belajar secara tuntas. Poin yang paling menarik dan berkesan adalah setiap tugas atau hasil karya siswa, selalu dipajang di dinding/tembok kelas ataupun di luar kelas siswa, apapun bentuknya, baik atau jelek semuanya harus dipajang. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi siswa

serta membantu mereka untuk mengevaluasi diri sendiri (*self evaluation*).

Kondisi-kondisi tersebut, mengakibatkan siswa-siswa sekolah dasar (Amerika) menjadi: (1) rajin membaca, (2) bisa menggunakan high technology, (3) disiplin tinggi, (4) kreativitas tinggi, (5) respect (hormat) dengan siapa saja, (6) percaya diri, jujur, sportif. Selain itu juga, kondisi-kondisi tersebut merangsang guru untuk: (1) menjadi lebih rajin membaca (banyak buku referensi), (2) bisa menggunakan high technology, (3) memiliki kreativitas tinggi, dan (4) menerapkan metode yang bervariasi.

BAB IV

PENDIDIKAN DI FILIPINA

Kita belajar tentang kisah yang tiada henti ini, dapat menginspirasi kita bahwa, sebaik apapun saat ini kita harus tetap menoleh sejarah perkembangan pendidikan dari Negara-negara lain, sebagai bahan perbandingan, ke depan akan diarahkan pada model pendidikan yang ideal yang bagaimana pendidikan di Indonesia. Sekarang marilah kita belajar dari Philipina, yang memiliki nasib hampir serupa dengan bangsa Indonesia yang mengalami masa penjajahan. Palupi (2015), seorang atase pendidikan Indonesia di Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Manila, yang saat ini sebagai guru besar Unesa, menceritakan tentang bagaimana kondisi pendidikan di Filipina. Dari bukunya tersebut, Palupi mendapatkan sambutan Duta besar LBBP-KBRI Manila yang menyatakan bahwa buku ini dapat dijadikan sebagai acuan tentang bagaimana mempromosikan pendidikan di Indonesia dan memastikan bahwa pendidikan di Indonesia dapat berlangsung lebih baik. Pendidikan bukanlah sesuatu yang hanya diperlukan dan ditujukan untuk

generasi muda melainkan juga untuk setiap orang yang yang haus pengetahuan dan tidak mempedulikan usia (tua ataupun muda).

Sejarah Pendidikan di Philipina

Sistem pendidikan Filipina sangat dipengaruhi oleh sejarah kolonial negara tersebut. Sejarah itu termasuk periode pemerintahan dan pendudukan Spanyol, Amerika, dan Jepang. Kontribusi yang paling penting dan abadi datang selama pendudukan Amerika di negara itu, yang dimulai pada tahun 1898. Pada periode itulah Inggris diperkenalkan sebagai bahasa pengantar utama dan sistem pendidikan publik pertama kali didirikan – sistem yang meniru Amerika yang dikelola oleh Departemen Instruksi.

Amerika Serikat meninggalkan kesan abadi pada sistem sekolah Filipina. Beberapa perguruan tinggi dan universitas didirikan dengan tujuan mendidik para guru bangsa. Pada tahun 1908, Universitas Filipina dicarter, mewakili universitas negeri komprehensif pertama dalam sejarah negara. Seperti Amerika Serikat, negara Filipina memiliki sistem pendidikan yang luas dan sangat inklusif,

termasuk pendidikan tinggi. Sampai dengan hari ini, Amerika Serikat terus memengaruhi sistem pendidikan Filipina, karena banyak guru dan profesor negara tersebut telah memperoleh gelar lanjutan dari universitas-universitas Amerika Serikat. Berikut ini merupakan periode perkembangan pendidikan di Filipina.

Periode Pra Spanyol: pendidikan berbentuk informal, tidak terstruktur, dan tanpa metode. Anak-anak diberikan pelatihan kejuruan akademisi, oleh orang tua mereka di rumah-rumah suku pembimbing dan tutor.

Periode Pendudukan Spanyol: Masa ini para guru atau tutor digantikan oleh misionaris Spanyol. Pendidikan yang diberikan saat ini lebih mengutamakan pada pendidikan agama untuk orang elite sehingga akses pendidikan bagi warga biasa menjadi sulit. Lebih parah lagi, kondisi ini diliberalisasikan oleh keputusan pendidikan oleh pemerintah Spanyol (1863). Ada sekolah dasar laki-laki dan perempuan di setiap kota yang dibimbing oleh guru pria. Sekolah di bawah pengawasan Yesuit dengan kurikulum yang ditekan dan dikendalikan.

Periode Transisi menjadi Negara Republik:

Kekalahan Spayol membawa perubahan pendidikan di bawah pemerintahan Aguinaldo menutup sekolah sementara, dan di buka kembali oleh Menteri Dalam Negeri (29 Agustus 1898). Pendidikan gratis dan wajib pendidikan dasar didirikan oleh konstitusi Malolos. Hal ini yang sama dengan sistem pendidikan di Indonesia. Pada periode ini The Burgos Institute di Malolos, Akademi militer, dan Akademi Sastra Universitas Filipina mulai didirikan.

Periode Pendudukan Amerika Serikat:

Sistem sekolah umum yang memadahi dan gratis. Dekade pertama masa pemerintahan amerika serikat. Ulama dan bintara ditugaskan mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Fokus pendidikan Amerika adalah demokrasi dan pembentukan warga Negara yang baik, terhasuk hak dan tanggung jawab rakyat. Bahasa Inggris dibudayakan. Anak usia 7 tahun harus sekolah. Mahasiswa diberikan bahan sekolah gratis. Ada tiga tingkat pendidikan, yaitu elementary (pendidikan dasar), tingkat primer Menengah (3 tahun), skunder (pendidikan menengah atas) setingkat SMA dan tingkat tersier (kuliah).

Periode Pendudukan Jepang: Kebijakan pendidikan dalam Militer Order No. 2 Tahun 1942 Philipina membentuk komisi pendidikan eksekutif, kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat, sekolah kembali dibuka pada bulan Juni 1942. Tanggal 14 Oktober 1943 didirikan Departemen pendidikan. Di bawah rezim Jepang, ajaran Tagalog, sejarah Filipina, dan pendidikan karakter, kerja keras dan martabat tenaga kerja sangat ditekankan. Pendidikan karakter ternyata ada di setiap lini pendidikan di kedua Negara. Tingkatan pendidikanpun juga pada jenjang yang hampir sama dengan Indonesia.

Periode Perang Dunia kedua: Berdasarkan Executive Order no 94 tahun 1947. Departemen Pendidikan mengatur dan mengawasi sekolah umum dan swasta. Setelah pendidikan Amerika yang radikal dan setelah perang dunia kedua, Filipina mengatur kebijakan pendidikannya sendiri dengan metode adopsi dan perbaikan pada system pendidikan yang telah ada sebelumnya.

Periode Era Presiden Markos: Tahun 1972 Departemen Pendidikan menjadi Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan. Sesuai dengan proklamasi 1081 tahun 1972. Setelah dilaksanakannya referendum di seluruh daerah di Filipina tanggal 10-15 Januari 1973. Presiden Ferdinans Marcos pada tanggal 17 Januari 1973 meratifikasi Undang-Undang Dasar 1973 sesuai dengan proklamasi 1102. Di dalam Undang-Undang 1973 terdapat 3 (tiga) tujuan mendasar pendidikan di Filipina, yakni memupuk cinta Negara, mengajarkan kewarganegaraan dan mengembangkan karakter moral, disiplin diri, dan ilmu pengetahuan, teknologi serta kejuruan efisiensi.

Periode Era Revolusi: Konsitusi diratifikasi tanggal 2 Februari 1987. Berdasarkan Executive Order No.117, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga menjadi Departemen Pendidikan, Budaya dan Olah Raga (Departement of Education, Cultural and Sport – DECS). Struktur DECS dalam EO No. 117 tidak berubah sampai 1994. Komisi Kongres Pendidikan (Education commission-EDCOM) pada tahun 1991 merekomendasikan DECS untuk membagi jenjang pendidikan menjadi 3 bagian. Tanggal 18 Mei 1994 Kongres meloloskan Undang Undang Higer Education Act of 1994, menciptakan komisi pendidikan tinggi (*Commision of Higher Education-*

CHED), yang dianggap sebagai biro pendidikan tinggi Filipina. Tanggal 25 Agustus 1994 Kongres meloloskan Undang-Undang Pendidikan Teknik dan Pengembangan Ketrampilan, menciptakan pendidikan dan ketrampilan teknis Development Authority (*Technical Education and Skills Development Authority – TESDA*) yang menyerap Biro Teknik Pendidikan Tenaga Kerja Nasional dan Dewan Pemuda, dan mengawasi non gelar teknis program kejuruan. DECS tetap bertanggung Jawab untuk semua pendidikan dasar dan menengah. Ketiga devisi ini dikenal sebagai sistem pendidikan trifocal di Filipina.

Struktur pendidikan di Filipina

Meskipun sistem pendidikan Filipina telah lama menjadi model bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya, dalam beberapa tahun terakhir sistem tersebut telah memburuk. Hal ini terutama terlihat di daerah yang lebih terpencil dan dilanda kemiskinan di negara ini seperti di daerah Mindanao dan Eastern Visayas yang memiliki tingkat penyelesaian sekolah dasar hanya 30 persen atau kurang. Akan tetapi, di Manila, ibukota dan kota terbesar di Filipina, tingkat penyelesaian sekolah dasar hampir

mencapai 100 persen. Berikut ini kita akan membahas sistem pendidikan Filipina termasuk diantaranya tentang tingkat pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan kejuruan dan universitas.

Pendidikan di Filipina ditawarkan melalui sistem formal dan non-formal. Pendidikan formal biasanya mencakup 14 tahun dan terstruktur dalam sistem 6 + 4 + 4: 6 tahun pendidikan sekolah dasar, 4 tahun pendidikan sekolah menengah, dan 4 tahun pendidikan tinggi, yang mengarah ke gelar sarjana. Ini adalah salah satu istilah pendidikan formal terpendek di dunia.

Di Filipina, tahun ajaran akademis dimulai pada bulan Juni dan berakhir pada bulan Maret, periode yang mencakup total 40 minggu. Semua lembaga pendidikan tinggi beroperasi pada sistem semester — semester musim gugur, semester musim dingin, dan jangka waktu musim panas opsional. Sekolah wajib untuk 6 tahun, dimulai pada usia 7 dan memuncak pada usia 12 tahun. 6 tahun ini merupakan pendidikan sekolah dasar anak.

Sekolah Menengah Atas di Filipina. Meskipun bahasa Inggris adalah satu-satunya bahasa pengantar di Filipina dari tahun 1935 hingga 1987, konstitusi baru menetapkan bahwa baik Pilipino (Tagalog) dan bahasa Inggris adalah bahasa resmi untuk pengajaran dan komunikasi. Namun, setelah sekolah dasar, bahasa pengantar hampir selalu bahasa Inggris, terutama di daerah perkotaan negara itu dan di sebagian besar universitas di negara itu.

Sistem pendidikan dikelola dan diawasi oleh Departemen Pendidikan, departemen federal dengan kantor di masing-masing dari 13 wilayah negara. Namun, pemerintah mengalami kesulitan untuk mendanai keseluruhan sistem pendidikan. Karena itu, sebagian besar uang yang dialokasikan untuk pendidikan digunakan untuk sekolah-sekolah dasar (mencapai angka pendaftaran 90%), sementara di tingkat sekolah menengah hanya berkisar sekitar 75%.

1. Pendidikan Dasar di Filipina:

Pendidikan sekolah dasar di Filipina berlangsung selama 6 tahun dan wajib untuk semua siswa. Sistem sekolah dasar di Filipina dibagi menjadi dua siklus:

- Siklus Primer. Empat tahun — Kelas 1-4, usia 6-11
- Siklus Menengah — Kelas 5 dan 6, usia 11-13

Di sekolah-sekolah negeri, usia sekolah dimulai pada usia 6 atau 7 tahun dengan kurikulum pembelajaran selama enam tahun. Di sekolah swasta, usia sekolah dimulai setahun lebih awal (5 tahun), namun dengan kurikulum pembelajaran selama tujuh tahun.

Pada akhir setiap tahun ajaran, siswa dipromosikan dari satu tingkat kelas ke tingkat berikutnya ketika mereka berhasil memenuhi standar yang ditentukan untuk masing-masing tingkat. Pada kelas satu dan dua, ¹⁴ bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa lokal dengan Bahasa Inggris dan Tagalog (Pilipino) sebagai bahasa kedua. Selanjutnya bahasa pengantar ²¹ dalam kelas menggunakan bahasa Inggris. Adapun mata pelajaran inti yang diajarkan di kelas sekolah dasar, adalah:

- Seni Bahasa (Pilipino, Bahasa Inggris dan Dialek Lokal)
- Matematika

- Kesehatan
- Ilmu pengetahuan alam

Selain mata pelajaran inti di atas, siswa di Kelas 1-3 juga belajar kewarganegaraan dan budaya. Di kelas 4-6 siswa belajar musik dan seni; pendidikan Jasmani; ekonomi rumah tangga dan mata pencaharian; dan studi sosial. Pendidikan nilai dan "tata krama yang baik dan perilaku yang benar" terintegrasi di semua bidang pembelajaran.

Semua siswa di sekolah dasar juga diperkenalkan ke Makabayan. Menurut Departemen Pendidikan, Makabayan adalah area pembelajaran yang berfungsi sebagai lingkungan praktik untuk pembelajaran holistik; sebuah area di mana siswa mengembangkan identitas diri pribadi dan nasional yang sehat yang mengintegrasikan berbagai keterampilan dan nilai-nilai dalam kehidupan (budaya, kejuruan, estetika, ekonomi, politik dan etika).

2. Pendidikan Lanjutan/Menengah di Filipina

Meskipun pendidikan menengah tidak diwajibkan, tetapi di kota-kota besar di Filipina, banyak warga yang

melanjutkan ke tingkat Pendidikan ini. Sekolah menengah ini memiliki durasi selama 4 tahun dengan kurikulum berdasarkan jenis sekolah. Menurut data statistik dari Departemen Pendidikan, sekitar 21% siswa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah. Pada tingkat ini, terdapat dua jenis sekolah utama: sekolah menengah umum (90%), sekolah menengah kejuruan, dan sekolah Sains (untuk siswa dengan bakat khusus di sains. Sekolah menengah kejuruan di Filipina berbeda dari sekolah menengah umum di mana mereka lebih fokus pada pelatihan berorientasi kejuruan, perdagangan dan seni praktis.

Jenis-jenis sekolah menengah di Filipina:

- Sekolah Menengah Umum

Sekolah Menengah Umum memiliki berbagai macam pelajaran. Di sini kurikulum terdiri dari bahasa atau seni komunikatif (Inggris dan Pilipino), matematika, sains, teknologi, dan ilmu sosial (termasuk antropologi, sejarah dan pemerintahan Filipina, ekonomi, geografi, dan sosiologi). Selain itu, siswa juga harus mengikuti pelatihan pengembangan pemuda (termasuk pendidikan jasmani, pendidikan kesehatan,

musik, dan pelatihan tentara warga), seni praktis (termasuk ekonomi rumah tangga, pertanian dan perikanan, seni industri dan kewirausahaan), pendidikan nilai dan beberapa pilihan, termasuk mata pelajaran dari keduanya jalur akademik dan kejuruan.

- Sekolah Menengah Kejuruan

Sekolah menengah kejuruan cenderung menawarkan pengajaran teknis dan kejuruan di salah satu dari lima bidang utama: pertanian, perikanan, perdagangan/teknis, industri rumah tangga, dan kursus non-tradisional dengan sejumlah spesialisasi. Jenis-jenis bidang kejuruan yang ditawarkan oleh sekolah kejuruan ini biasanya tergantung pada wilayah spesifik di mana sekolah tersebut berada. Misalnya, di wilayah pesisir, perikanan adalah salah satu bidang kejuruan yang paling populer yang ditawarkan. Selama dua tahun awal studi di salah satu sekolah menengah kejuruan nasional, siswa mempelajari area kejuruan umum. Kemudian di tahun ketiga dan keempat mereka harus berspesialisasi dalam disiplin khusus dalam bidang kejuruan umum itu.

- Sekolah Menengah Sains

Sistem Sekolah Tinggi Sains Filipina adalah sistem khusus di bawah naungan dari Departemen Sains dan Teknologi Filipina. Terdapat sembilan kampus regional, dengan kampus utama terletak di Kota Quezon. Siswa diterima berdasarkan hasil evaluasi khusus (Ujian Kompetitif Nasional Sistem PSHS). Kurikulum di 9 sekolah Sains Menengah negara ini sangat mirip dengan Sekolah Menengah Umum. Namun, mereka juga harus mengikuti dan lulus berbagai kursus lanjutan dalam matematika dan sains.

3. Pendidikan Tinggi

Di Filipina terdapat sekitar 1.621 lembaga pendidikan tinggi, di mana sekitar 1.445 (hampir 90 persen) berada di sektor swasta. Sebelum tahun 1994, semua Perguruan Tinggi berada di bawah pengawasan Biro Pendidikan Tinggi, sebuah divisi dari Departemen Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga. Namun, sekarang, dengan disahkannya Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 1994, sebuah badan pemerintah independen yang dikenal sebagai Komisi Pendidikan Tinggi (CHED) melakukan

pengawasan umum dan kontrol atas semua perguruan tinggi dan universitas di Filipina.

Pada sistem CHED, terdapat empat tingkatan akreditasi untuk Lembaga Pendidikan tinggi, yaitu:

- Level I. Memberikan status pelamar ke sekolah-sekolah yang telah menjalani survei pendahuluan dan mampu memperoleh status terakreditasi dalam waktu dua tahun.
- Tingkat II. Memberikan deregulasi administrasi penuh dan otonomi kurikuler parsial, termasuk prioritas dalam bantuan dana dan subsidi untuk pengembangan fakultas.
- Tingkat III. Sekolah diberikan deregulasi kurikuler penuh, termasuk hak istimewa untuk menawarkan program pendidikan jarak jauh.
- Tingkat IV. Universitas berhak menerima hibah dan subsidi dari Dana Pengembangan Pendidikan Tinggi dan diberikan otonomi penuh dari pengawasan dan kontrol pemerintah.

BAB V

PENDIDIKAN DI INDONESIA

Setelah kita pelajari dari perjalanan kisah yang tiada akhir dari kedua Negara, ternyata hal terpenting dalam kurikulum adalah membangun kurikulum yang dapat menjadikan generasi yang lebih baik. Keduanya, bahkan menetapkan pendidikan karakter sebagai tonggak pendidikan. Demikian juga di Indonesia, secara bertahap pendidikan di Indonesiapun bermuara pada pembentukan generasi millennium yang berkarakter.

Sejarah pendidikan di Indonesia

Indonesia telah mengalami masa penjajahan lebih dari 380 tahun yang sangat mempengaruhi tidak hanya pada sistem pemerintahan tetapi juga pada sistem pendidikan. Secara garis besar, sejarah pendidikan di Indonesia terbagi atas sistem pendidikan di masa kerajaan, sistem pendidikan pra kemerdekaan, dan masa kemerdekaan. Pada periode sejarah Indonesia terdapat lima era, yaitu era prakolonial (munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha serta Islam di Jawa dan Sumatera

yang terutama mengandalkan perdagangan); era kolonial (masuknya orang-orang Eropa, terutama Belanda, yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20); era awal kemerdekaan (pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia (1945) sampai jatuhnya Soekarno (1966)); era Orde Baru (32 tahun masa pemerintahan Soeharto (1966–1998)); serta era Reformasi yang berlangsung sampai sekarang.

A. Pendidikan Indonesia di Masa Kerajaan

Pada kerajaan Mataram kuno (berpusat di Jawa Tengah) aktivitas pendidikannya meliputi menterjemahkan buku-buku agama Budha, menterjemahkan buku-buku lain ke bahasa Jawa kuno seperti Ramayana. Pada masa ini kerajaan Mataram kuno sudah memiliki perguruan tinggi yang terbagi dalam beberapa fokus studi, seperti agama, sastra, atau ilmu bangunan.

29
a. Pendidikan di Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Budha

29
Perkembangan pendidikan di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman Hindu dan Budha pada abad ke-5 masehi. Dari perkembangan sejak zaman itu telah diperoleh gambaran bahwa pendidikan telah berlangsung sesuai dengan tuntutan zaman yang berbeda-beda dengan penyesuaian pada ideologi, tujuan serta sistem pelaksanaannya. Dalam catatan Ptolomeus, dia juga menyebut tentang Barousai (merujuk pada pantai barat Sumatera Utara; Sriwijaya). Selain itu Fa-Hien (penjelajah asal China) dalam perjalanannya dari India singgah di Ye-po-ti (Jawa) telah menemui banyak brahmana (Hindu). Dari tulisan-tulisan tersebut dapat ditarik sebuah simpulan lembaga-lembaga pendidikan telah ada di Indonesia sejak periode permulaan. Meskipun keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut lebih terkait dengan agama.

b. Pendidikan di Indonesia pada masa kerajaan Islam

4
Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12, namun sebenarnya Islam

sudah sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad 7.

4

Penyebaran Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara; hal ini, karena para penyebar dakwah atau mubaligh merupakan utusan dari pemerintahan Islam yang datang dari luar Indonesia, maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para mubaligh ini bekerja melalui cara berdagang, para mubaligh inipun menyebarkan Islam kepada para pedagang dari penduduk asli, hingga para pedagang ini memeluk Islam dan menyebarkan pula ke penduduk lainnya, karena umumnya pedagang dan ahli kerajaan lah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kerajaan Islam penting termasuk di antaranya: Kerajaan Samudera Pasai, Kesultanan Banten yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, Kerajaan Mataram, dan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku.

B. Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajah Bangsa Barat

Pada awal abad ke 16, bangsa Portugis datang ke Indonesia dengan tujuan perdagangan dan berusaha menyebarkan agama katolik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendatang Portugis ini mendirikan sekolah yang bertujuan memberikan pendidikan baca, tulis, dan hitung sekaligus mempermudah penyebaran agama katolik. Masuknya masa pendudukan Belanda membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah milik pendatang Portugis menjadi terhenti.

Belanda juga membawa misi serupa Portugis yaitu menyebarkan agama Protestan kepada masyarakat setempat. Untuk mewujudkan misi ini, Belanda melanjutkan apa yang dirintis oleh bangsa Portugis dengan mengaktifkan kembali beberapa sekolah berbasis keagamaan dan membangun sekolah baru di beberapa wilayah. Ambon menjadi tempat yang pertama dipilih oleh Belanda dan setiap tahunnya, beberapa penduduk Ambon dikirim ke Belanda untuk dididik menjadi guru. Memasuki

tahun 1627, telah terdapat 16 sekolah yang memberikan pendidikan kepada sekitar 1300 siswa.

Setelah mengembangkan pendidikan di Ambon, Belanda memperluas pendidikan di pulau Jawa dengan mendirikan sekolah di Jakarta pada tahun 1617. Berbeda dengan Ambon, tidak diketahui apakah ada calon guru lulusan dari sekolah ini yang dikirim ke Jakarta. Lulusan dari sekolah tersebut dijanjikan bekerja di berbagai kantor administratif milik Belanda.

Memasuki abad ke 19, saat Van den Bosch menjabat Gubernur Jenderal, Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang membutuhkan banyak tenaga ahli. Keadaan ini membuat Belanda mendirikan 20 sekolah untuk penduduk Indonesia di setiap ibukota karesidenan dimana pelajar hanya boleh berasal dari kalangan bangsawan. Ketika era tanam paksa berakhir dan memasuki masa politik etis, beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari berbagai kalangan yang kemudian berkembang menjadi bernama Sekolah Rakjat.

¹ Pada akhir era abad ke 19 dan awal abad ke 20, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi masyarakat Indonesia dengan struktur sebagai berikut.

- ELS (Europeesche Lagere School) – ⁴¹ Sekolah dasar bagi orang eropa.
- HIS (Hollandsch-Inlandsche School) – Sekolah dasar bagi pribumi.
- ¹⁰ MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) – Sekolah menengah.
- AMS (Algeme(e)ne Middelbare School) – Sekolah atas.
- HBS (Hogere Burger School) – Pra-Universitas.

Memasuki abad ke 20, Belanda memperdalam pendidikan di Indonesia dengan mendirikan sejumlah perguruan tinggi bagi penduduk Indonesia di pulau Jawa. Beberapa perguruan tinggi tersebut adalah:

- ¹⁰ School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) – Sekolah kedokteran di Batavia.
- ¹ Nederland-Indische Artsen School (NIAS) – Sekolah kedokteran di Surabaya.
- Rechts Hoge School – Sekolah hukum di Batavia.

- De Technische Hoges School (THS) – Sekolah teknik di Bandung.

Dalam periode konsolidasi mengenai reaksi-reaksi terhadap pendidikan dan pengajaran kolonial Belanda yaitu:

1. *Pergerakan Budi Utomo*

Budi Utomo merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusudo. Beliau mendirikan organisasi ini untuk memberikan kesempatan pemuda-pemuda pelajar agar melanjutkan pendidikan dan pengajaran yang lebih tinggi. Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dalam lingkungan STOVIA, dan diberi nama BUDI UTOMO. Dalam gerakannya BUDI UTOMO selalu memperjuangkan perluasan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat Indonesia. Tujuan didirikan sekolah-sekolah yaitu untuk menghidupkan rasa kebangsaan, dan kecintaan kepada kebudayaan sendiri, mempelajari kesenian sendiri, memelihara bahasa sendiri, mempelajari kesusastraan sendiri, dan lain sebagainya.

2. Pergerakan Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Ahmad Dahlan (1868-1925). Kyai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama yang tegas dan berkeinginan untuk memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia berlandaskan cita-cita agama Islam. Usaha-usahnya ditujukan kepada perbaikan kehidupan rakyat dengan cara memperbaiki hidup beragama. Pergerakan Muhammadiyah mengutamakan tujuan pendidikannya pada perbaikan hidup beragama dengan amal-amal pendidikan dan social yang berpijak pada Al-Qur'an dan hadist.

3. Perguruan Nasional Taman Siswa

Taman Siswa ini dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 oleh Ki Hajar Dewantara, putra dari Pangeran Ario Suryaningrat dan cucu dari Pakualam III. Dasar pendidikan didirikannya Taman Siswa pada tahun 1922, mempunyai senjata ampuh yang terkenal dengan istilah "Non-Cooperation" dan "self-help" atau Zelf- bedruipings System". Non-Cooperation ialah sikap menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. *Self-help* atau *Zelf-bedruipings System* ialah

sistem bersandar kepada kemampuan diri sendiri, atau sistem membiayai diri sendiri dalam mengemudikan Pendidikan Taman Siswa, yang menuju kepada pembangunan perekonomian rakyat yang berdasarkan koperasi serta pendidikan rakyat yang berdasarkan kebangsaan.

4. Pendidikan Indonesia Pada Masa Jepang

Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang mengadakan perubahan-perubahan yang besar dengan menghapus berbagai jenis pendidikan rendah berdasarkan golongan-golongan penduduk itu, yang ada hanya satu jenis sekolah rendah untuk sekolah lapisan masyarakat yang disebut "*Syoo-gekkoo*" (sekolah rendah) lama belajarnya 6 tahun. Selanjutnya, ada "*Tyuu Gakkoo*" (sekolah menengah pertama) 3 tahun "*Kootoo gakkoo*". Sedang sekolah pendidikan gurunya ialah *Kyoin Yoogoi sho* (sekolah guru B) dan "*Si-han Gakkoo*" (sekolah guru atas). Pendidikan ala Jepang mempunyai progresivitas dan lebih dinamis, tetapi dinamika dan progresivitas itu lebih ditekankan pada *physical training* (latihan fisik), bukan mental disiplin. Demokratisasi pendidikan pada

masa penjajahan Jepang juga mempunyai tujuan politis, dan tidak bersifat dinamis. Tujuan pendidikan pada zaman Jepang bukan untuk memajukan bangsa Indonesia, tetapi mendidik anak-anak untuk dapat menunjang kepentingan perang Jepang melawan sekutu.

Kelemahan pendidikan zaman Jepang

- Kerja bakti; kinrohosi, cari iles-iles : nama jarak cari besi tua
- Bahasa Inggris dilarang : pengetahuan sempit
- Latihan kemiliteran/ baris-berbaris : kyoren

Keuntungan pendidikan zaman Jepang

- Sekolah rakyat 6 tahun
- Bahasa Indonesia : bahasa pengantar
- Senam pagi : taiso

C. Pendidikan Indonesia Pada Masa Kemerdekaan

Pendidikan dan pengajaran sampai tahun 1945 diselenggarakan oleh kantor pengajaran yang terkenal dengan nama *Bunkyo Kyoku* dan merupakan bagian dari kantor penyelenggara urusan pamong praja yang

disebut dengan *Naimubu*. Setelah di proklamasikannya kemerdekaan, pemerintah Indonesia yang baru dibentuk menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai menteri pendidikan dan pengajaran (19 Agustus–14 November 1945) yang kemudian digantikan oleh Mr. Dr. T.G.S.G Mulia (14 November 1945–12 Maret 1946) Mohamad Syafei (12 Maret 1946–2 Oktober 1946).

a. Tujuan dan Kurikulum Pendidikan

Dalam kurun waktu 1945-1969, tujuan pendidikan nasional Indonesia mengalami lima kali perubahan. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Mr. Suwandi, pada tanggal 1 Maret 1946. Tujuan pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan amat menekankan penanaman jiwa patriotisme.

Sejalan dengan perubahan suasana kehidupan kebangsaan, tujuan pendidikan nasional Indonesia pun mengalami perluasan. Dalam Undang-Undang No. 4/1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah "tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cukup

dan warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”.

Kurikulum sekolah pada masa-masa awal kemerdekaan dan tahun 1950-an ditujukan untuk:

- meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat,
- meningkatkan pendidikan jasmani,
- meningkatkan pendidikan watak,
- memberikan perhatian terhadap kesenian,
- menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, dan
- mengurangi pendidikan pikiran.

Menyusul meletusnya G-30 S/PKI yang gagal, maka melalui TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan diadakan perubahan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yaitu, “membentuk manusia pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945”.

b. Sistem Persekolahan

Sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan pada dasarnya melanjutkan apa yang dikembangkan pada zaman pendudukan Jepang. Sistem dimaksud meliputi tiga tingkatan yaitu pendidikan rendah (Sekolah Rakyat – SR 6 tahun), pendidikan menengah pertama dan tinggi (masing-masing tingkat memiliki lama 3 tahun), dan pendidikan tinggi .

Pada masa kemerdekaan, tujuan pendidikan adalah mendidik menjadi ²⁴ warga Negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk Negara dan masyarakat.

- ⁵ 1. Periode 1945-1950
 - Pendidikan rendah (SR) selama enam tahun
 - Pendidikan menengah umum terdiri atas Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) lamanya masing-masing 3 tahun
 - Pendidikan kejuruan.

Kejuruan Tingkat Pertama terdiri atas; Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Teknik Pertama (STP), Sekolah Kepandaian Pertama (SKP), Sekolah Guru B (SGB), Sekolah Guru Darurat untuk kewajiban Belajar (KPKPKB). Sementara Kejuruan Tingkat Menengah terdiri atas; Sekolah Teknik Menengah (STM), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Pendidikan Masyarakat (SPM), Sekolah Menengah Kehakiman Atas (SMKA), Sekolah Guru A (SGA), Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak (SGTK), Sekolah Guru Kepandaian Puteri (SGKP), Sekolah Guru Pendidikan Jasmani (SGPD)

- Perguruan Tinggi.

Perguruan Tinggi terdiri atas Universitas konservatori/Karawitan, Kursus B-1, dan ASRI.

2. Periode 1950-1975

- Pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar. Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD)
- Pendidikan Menengah Umum. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)
- Pendidikan Kejuruan. Tingkat pertama; SMEP, SKP, ST, SGB, KPKPKB, dan tingkat Menengah, SMEA, SGA, SKMA, SGKP, SPMA, SPM, STM, dan SPIK Pendidikan Tinggi. Universitas, Institut Teknologi, Institut Pertanian, Institut.
- Keguruan, Sekolah Tinggi dan Akademi.

3. Periode 1978-sekarang

- Pendidikan pra sekolah (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pendidikan dasar
- Sekolah Menengah Umum, SMP (SLTP), dan SMA (SLTA/SMU)

- Pendidikan Menengah Kejuruan, Tingkat Pertama; ST.SKKP. Tingkat Atas terdiri atas; Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Pendidikan Tinggi. Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Diploma, dan Politeknik.

D. Pendidikan Indonesia pada tahun 1994-sekarang

Sejak 2 Mei 1984, Indonesia telah menerapkan wajar (Wajib Belajar) 6 tahun yang kemudian berubah menjadi 9 tahun pada tanggal 2 Mei 1994. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mempunyai 2 tujuan utama yang berkaitan satu sama lain. Pertama, meningkatkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap kelompok umur 7-15 tahun. Kedua untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia hingga mencapai SLTP. Dengan wajib belajar, maka pendidikan minimal bangsa Indonesia semula 6 tahun ditingkatkan menjadi 9 tahun.

Sasaran-sasaran wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dalam pelita VI adalah, pertama, meningkatkan

angka partisipasi kasar (APK) tingkat SLTP menjadi 66,19% dari keadaan pada awal pelita V yang mencapai 52,67%. Kedua, meningkatkan jumlah lulusan SD/MI yang tertampung di SLTP dan MTs. Ketiga, tercapainya jumlah guru SD berkualifikasi.

Tantangan yang dihadapi oleh ⁶ program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun memang lebih besar jika dibandingkan dengan wajib belajar 6 tahun. Alasannya dikarenakan: pertama, pada saat dimulainya ⁶ wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, baru sekitar separuh dari kelompok umur 13-15 tahun yang berada di sekolah. Kedua, daya dukung berupa dana, sarana, dan tenaga yang dimiliki oleh Indonesia untuk melaksanakan ¹⁴ wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak lagi sebanyak ⁶ pada saat dilaksanakan wajib belajar 6 tahun. Sejak di mulai pada tahun 1994, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun mencapai banyak kemajuan. Indikator-indikator kuantitatif yang di catat menunjukkan bahwa angka ⁷ partisipasi meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya ruang belajar, jumlah guru, dan fasilitas belajar lainnya.

Kurikulum 1994 diberlakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 1994/1995. Kurikulum 1994 disusun dengan maksud agar proses pendidikan dapat selalu menyesuaikan diri dengan tantangan yang terus berkembang, sehingga mutu pendidikan akan semakin meningkat. Disahkannya UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diikuti oleh berbagai peraturan pemerintah mempunyai implikasi pada perlunya kurikulum pendidikan mengalami penyesuaian. Menyusul terjadinya informasi, dilakukan kembali revisi atas kurikulum 1994 dengan menata kembali struktur programnya yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1994 yang disempurnakan.

Memasuki tahun 1995, pendidikan Indonesia menekankan pada pengembangan SDM yang mampu menjawab tantangan masa depan. Terdapat empat prioritas utama pelaksanaan pendidikan yaitu:

1. Penuntasan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.
2. Peningkatan mutu semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.
3. Menghubungkan kebutuhan antara pendidikan dan industri.

4. Peningkatan kemampuan penguasaan iptek.

² Sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan pada masa kepresidenan Megawati melalui kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini berbasis ³⁷ pada 3 aspek utama yaitu aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperbarui kurikulum tersebut menjadi kurikulum tingkat ² satuan pendidikan (KTSP) yang mencakup tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus.

Perubahan lanjutan dari pelaksanaan kurikulum KTSP adalah munculnya kurikulum 2013 atau lebih dikenal sebagai K-13 ⁴ (Permendikbud No 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013; Permendikbud No 33, 49, 57, 58, 59, dan 60 Tahun 2014). Yang kemudian diperbaharui menjadi K-13 revisi. Selanjutnya pelaksanaan kurikulum K-13 revisi ini berlangsung sampai dengan periode kedua pemerintahan Jokowi yang kemudian melunjurkan pembaharuan dari model K-13 revisi melalui kurikulum

merdeka belajar. Kurikulum ini berdasarkan pada acuan di mana system Ujian Nasional akan dihapuskan dikarenakan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dari perkembangan itu sendiri. Kurikulum merdeka ini diluncurkan pada tahun 2021 yang akan mendasarkan system penilaian pada kemampuan individual sesuai dasar kompetensi minimum dan karakter.

Seiring dengan meningkatnya mutu dan partisipasi pendidikan dasar di Indonesia, dan berkembangnya minat terhadap pendidikan menengah, isu pendidikan di Indonesia kini beralih pada jenjang pendidikan tinggi. Pada tahun 2011, angka partisipasi kasar (GER) untuk pendidikan tinggi di Indonesia hanya mencapai 25%. Angka ini lebih rendah dibanding rata-rata global yang mencapai 31% dan kebanyakan negara anggota ASEAN. Meskipun demikian, angka ini sebenarnya meningkat signifikan dibanding sepuluh tahun yang lalu dimana angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia hanya mencapai 12%.

Pada era pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) belum terlihat adanya indikasi upaya radikal

dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Secara fundamental, kebijakan pendidikan masih sejalan namun dengan beberapa perbaikan dan penyesuaian. Perubahan banyak terjadi pada tataran teknis dan masyarakat masih menanti upaya pemerintah dalam mengatasi masalah dan kekurangan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Akan tetapi beberapa kebijakan baru muncul di mana tujuan penyelenggaraan pendidikan kembali mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada pembukaan UUD 1945, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kebijakan terbaru tentang penyelenggaraan Pendidikan pada era kedua pemerintahan Jokowi, yakni adanya program 'kurikulum merdeka'. Program ini berisikan kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) yang dimulai pada tahun 2021 dan digantikan dengan sistem penilaian Asesmen Kompetensi Minimum dan survei karakter.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia (modern), terdapat tiga jalur pendidikan utama, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Selain itu pendidikan di

Indonesia juga terbagi ke dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Di samping itu pula berdasarkan tujuan pendidikan, terdapat tujuh jenis pendidikan, yaitu pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Berdasarkan jenjang pendidikan:

9
1. Pendidikan anak usia dini

Mengacu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah sebuah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak berusia 0-6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh-kembang anak dan mempersiapkan mereka untuk memasuki pendidikan lebih lanjut sesuai dengan Permendikbud No 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

9
2. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) yaitu Sekolah Dasar (SD) selama

6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun. Pendidikan dasar merupakan Program Wajib Belajar. Dasar dari Penyelenggaraan Pendidikan dasar ini adalah 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Pendidikan Menengah

Pada UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan UU No 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP No 7 Tahun 2010 yang kemudian diubah oleh PP 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; serta Permendikbud No 22 Tahun 2016: Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan dasar aturan tentang penyelenggaraan pendidikan menengah. Pendidikan ini merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun waktu tempuh pendidikan. Dasar aturan yang mengatur pelaksanaan pendidikan ini adalah

4. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program

pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi ini adalah Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta PP No. 19 Tahun 2005 jo No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan jalur pendidikan:

1. *Pendidikan formal*

Merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

2. *Pendidikan Nonformal*

Mengacu pada UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 26 dan 62 tentang penyelenggaraan Pendidikan Nonformal serta PP No 73 tahun 1991 tentang penyelenggaraan Pendidikan luar sekolah. Jenis pendidikan non-formal tersebut dilaksanakan. Jenis pendidikan nonformal sering ditemukan pada jenjang pendidikan anak

usia dini (dari PAUD sampai dengan TK). Selain itu, jenis pendidikan ini dapat pula berdasar pada pendidikan keagamaan seperti TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) dan Sekolah Minggu yang diadakan di gereja. Di samping itu pula, kursus keahlian seperti musik, masak, bahasa, dll. juga termasuk di dalam lingkup pendidikan non-formal.

3. Pendidikan Informal

Jalur pendidikan informal adalah pendidikan yang mengacu pada lingkungan sekitar (keluarga dan masyarakat) yang terbentuk secara mandiri dan dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab. Dasar penyelenggaraan Pendidikan informal adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan; UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 17, 13, dan 16; UU Sisdiknas, Bagian Keenam Pendidikan Informal Pasal 27; serta PP no. 17/2010 Pasal 117 dan 115.

Berdasarkan tujuan pendidikan:

1. Pendidikan umum

Merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya: sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

2. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan merupakan kelompok jenjang pendidikan menengah yang memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar siap kerja (pada bidang tertentu). Bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan (SMK). Terdapat beberapa dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan, diantaranya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 2018 tentang standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan.

2

3. Pendidikan akademik

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

4. Pendidikan Profesi

Merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki profesi atau menjadi seorang profesional. Penyelenggaraan pendidikan profesi ini berdasar pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar, dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi.

11

5. Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi merupakan jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk membekali peserta didik pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana (strata 1). Dasar penyelenggaraan pendidikan vokasi adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan program diploma dalam sistem terbuka pada perguruan tinggi.

1

6. Pendidikan keagamaan

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

7. Pendidikan khusus

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan yang ditujukan untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk sekolah luar biasa/SLB).

Dengan model pembagian pada sistem pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa hal yang menjadikan sistem pendidikan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di Asia Tenggara maupun di dunia. Adapun beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat pada:

1. Hasil akhir adalah #1

Di Indonesia, setiap jenjang pendidikan memiliki evaluasi akhir yang digunakan sebagai standar untuk mengetahui keberhasilan pendidikan. Akan tetapi hal ini justru menjadi sebuah momok yang akhirnya menjatuhkan pendidikan itu sendiri. Hal ini dikarenakan setiap peserta didik akan berlomba-lomba dan memfokuskan diri pada 'hasil akhir'. Bahkan tidak jarang sampai menghalalkan berbagai macam cara.

Situasi tersebut berbeda dengan kebanyakan jenjang pendidikan di luar negeri, contohnya saja di Amerika, di mana hasil akhir bukanlah segala-galanya. Para pendidik lebih menitikberatkan pada sektor prosesnya daripada hasil akhir.

2. Jam pelajaran

Selain hasil akhir, banyaknya materi yang diberikan dengan jam belajar yang cukup lama juga membuat seseorang tidak dapat mencerna pelajaran atau segala informasi yang diberikan karena otak terlanjur 'panas' dan susah untuk digunakan mengingat secara detail. Sedangkan di luar negeri, materi yang diberikan hanyalah yang berupa poin khususnya saja dan jam pendidikannya akan lebih dititikberatkan pada praktik, sehingga seorang siswa atau mahasiswa akan lebih mengerti dan paham secara langsung daripada hanya menghafal teori dan materi.

Di luar negeri, jam belajar untuk hal-hal yang berbaur teori sangat terbatas dan selebihnya akan diisi dengan professional development dan praktik. Seperti yang pernah dikatakan oleh Amin Raiz mantan ketua MPR RI (periode 1999–2004), yang menjelaskan bahwa Indonesia masih menganut sistem spoon feeding, di mana guru akan menjadi satu-satunya sumber ilmu/informasi. Selain itu, tambahan-tambahan ekstrakurikuler sampai dengan kursus atau bimbingan belajar juga menambah panjang

jam belajar seseorang yang mengakibatkan penat dan capek tidak hanya fisik saja, melainkan juga pikiran

3. Sedikitnya masa-masa bermain anak

Usia balita dan kanak-kanak adalah masa yang paling menyenangkan bagi seorang anak, karena di waktu itu mereka dapat belajar banyak hal sembari bermain. Namun sejak adanya pengenalan pendidikan usia dini di Indonesia, waktu bermain anak menjadi berkurang, hal ini mengakibatkan sang anak terlanjut terbebani dengan aturan 'formal'. Sedangkan di luar negeri? Misalnya di Finlandia, seorang anak dapat mulai masuk ke jenjang pendidikan dasar ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Sebelum itu, maka mereka dapat mengeksplorasi apa yang mereka inginkan, salah satunya adalah bermain.

4. Kelas unggulan dan kelas biasa

Sejak adanya model pendidikan inklusi, banyak sekolah di Indonesia menerapkan pembagian kelas yang memisahkan anak berdasarkan kemampuan akademik. Hal ini hampir tidak ditemukan pada sistem pendidikan di negara-negara maju.

Dari sudut pandang pendidikan, pemisahan kelas berdasarkan prestasi akademik akan membantu proses pembelajaran di mana guru atau materi yang disiapkan dapat diselaraskan sehingga tidak terjadi ketimpangan penyerapan materi. Namun secara tidak langsung, dampak psikologis dari pembagian ini akan membuat siswa menjadi terpisah-pisah dan dapat pula mengakibatkan timbulnya 'ego' bagi siswa yang masuk ke dalam kelas unggulan.

Dengan bentuk sistem pendidikan yang seperti itu, Indonesia dihadapkan pada sebuah tantangan untuk menghadapi abad pengetahuan. Kondisi yang dimiliki oleh sistem pendidikan di Indonesia dapat menjadi tantangan tersendiri dalam menyongsong abad pengetahuan. Adapun kesiapan Indonesia dalam menghadapi abad pengetahuan dapat terlihat dari:

a. Kesiapan dalam menghadapi Teknologi dan Komunikasi

Di Indonesia untuk menghadapi Schools for the 21st Century, harus membuat reformasi sekolah, yaitu dengan

cara menciptakan budaya untuk memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi, mengubah informasi menjadi pengetahuan dapat digunakan, dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah, menghasilkan kenikmatan estetika dan artistik penghargaan, memperkaya sipil dialog dan wacana, dan meningkatkan kualitas kehidupan batin kita serta kehidupan orang-orang dengan siapa kita berinteraksi setiap hari, baik di Internet atau muka dengan muka. Imperatif teknologi dan komunikasi sama pentingnya dengan ekonomi, kemasyarakatan, dan budaya imperatif.

45 Kasus yang terjadi di Indonesia, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang secara tidak langsung telah banyak mempengaruhi dunia pendidikan dan pembelajaran di negara ini. Guru-guru kita harus mempercepat meng-update pengetahuan dan keterampilannya alih-alih kompetensinya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Guru-guru kita ternyata tidak bisa dengan mudah begitu saja menguasai bidang IPTEK, karena faktor usia, dukungan sarana peralatan, kesempatan dan dukungan kebijakan dari

atasan, hingga ketersediaan infrastruktur di sekolah yang tidak sederhana dan dengan mudah bisa disesuaikan.

Kondisi ini bisa penulis rasakan tak kala seorang guru masih kesulitan dalam memperoleh dukungan manajemen dan finansialnya terhadap hasil jerih payahnya yang telah diraih selama ini. Fakta ini bisa dilihat dari 19 orang guru yang mewakili jenjang SD, SMP dan SMA yang mengikuti lomba "Inovasi Media Pembelajaran" yang baru-baru ini telah dilaksanakan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat dapat menjadi cermin bagaimana pihak manajemen, para pengelola, dan para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan kurang begitu gencar dalam memfasilitasi karya dan inovasi guru-guru terpilih ini.

b. Kesiapan Sekolah

Ketika siswa dianggap sebagai pelanggan dan pengetahuan bekerja dianggap sebagai produk sekolah, ini adalah masalah *Reframed*, yang menggerakkan kualitas. Dalam ilmu manajemen disebut *Total Quality Management* telah menjadi kata kunci di dalam bisnis

maupun pendidikan. gerakan kualitas W. Edwards Deming (1986), meskipun orang lain, seperti Philip Crosby (1979), Dalam reformasi pendidikan yang perlu dibahas antara lain:

1) Kualitas input

Kualitas input selalu dinaikkan melalui standar kelulusan siswa, tetapi dalam kenyataannya, standar kelulusan tidak bisa dicapai maksimal mengingat banyaknya kecuranga-kecurangan yang terjadi dalam ujian nasional, sehingga hasilnya bias dan tidak dapat mencerminkan kondisi yang ada.

2) Ide Kreatif

Pemerintah telah mengeluarkan KTSP sebagai pencerminan bahwa setiap sekolah melalui guru harus mampu merancang dengan berbagai pembelajaran kreatif. Dalam kenyataannya guru-guru masih menggunakan *target-oriented* untuk mencapai kelulusan siswa, dengan memadatkan waktu untuk mempersiapkan unas, sehingga melupakan model pembelajaran kreatif yang telah disetting pada kurikulum KTSP. Guru sebaiknya merancang

pembelajaran aktif, melalui contoh-contoh khusus untuk membuat pembelajaran menarik. Terlepas dari mode atau gaya belajar, itu adalah apa yang siswa lakukan dan makna yang mereka berikan kepada apa yang mereka lakukan yang menentukan apa yang mereka pelajari. Guru yang melakukan harus lebih penting membelajarkan siswa "Siswa *doing*". Guru sebagai pemimpin dan penemu pengetahuan kerja sebagai Product of School

- 3) Sinergi pendidikan dari orang tua, sekolah, perpustakaan, koran lokal, dan tempat ibadah adalah sumber utama informasi di masyarakat. Lebih jauh lagi, masyarakat sudah relatif memperkuat kontrolnya terhadap tingkat akses muda harus informasi yang tersedia. Willard Wailer ([1932] 1967, p. 34) pernah menggambarkan sekolah sebagai "museum kebajikan".

Sedangkan yang terjadi di Indonesia, peran serta orang tua terpisah dengan sekolah. Masih adanya persepsi bahwa membantu anak belajar merupakan 'kewajiban' dan tanggungjawab sekolah dan orangtua belum atau tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Perpustakaan masih terbatas untuk koleksi yang buku tercetak, sehingga koleksi informasi pun menjadi terbatas. Sekolah dengan tempat ibadah juga belum disinergikan, seolah menjadi tempat yang terpisah dan tugas yang terpisah, seharusnya sekolah menggunakan tempat ibadah sebagai tempat pengembangan belajar norma.

- 4) Peranan teknologi, sekolah menyiapkan seperangkat pembelajaran yang lebih canggih melalui anggaran pemerintah dan melakukan perbaikan sekolah dan pembaharuan sekolah belum cukup memadai, peranan pendidik/guru belum optimal karena keterbatasan sarana computer.
- 5) Kurikulum dikembangkan tetapi guru masih belum mampu mengembangkan secara optimal yang mengarah pada tujuan operasional yang kreatif seperti di atas.

Untuk menghadapi abad pengetahuan, Indonesia setidaknya dapat merujuk pada sejarah perkembangan di Amerika, yakni melalui:

- a. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, yaitu melalui sertifikasi, yang sudah berlangsung sejak tahun 2008-sekarang.
- b. Pemerintah merancang program guru bermutu, pendidikan karakter untuk menumbuhkan Nilai-nilai keluarga hendaknya tetap dilestarikan dalam berbagai lingkungan pendidikan.
- c. *The Motivation to Change*, yang sudah diupayakan oleh pemerintah adalah gerakan *Long life of education*, sedangkan Visi dan misi dan Revolusi teknologi belum dilakukan secara menyeluruh.
- d. Pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap untuk meningkatkan fasilitas sekolah melalui program-program peningkatan mutu.
- e. Guru belum mampu me-*linkkan* antara kegiatan bisnis dalam muatan kurikulum yang diajarkan, guru pada saat ini lebih diarahkan pada pembelajaran kreatif.
- f. Meningkatkan kualitas sekolah

Sejalan dengan berkembangnya pendidikan di Indonesia, maka kurikulum pun turut berkembang dari kurikulum KBK (2004), KTSP (2006), K-13 (2013), dan K-13 revisi (sampai dengan sekarang). ² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) menjelaskan bahwa kurikulum 2013 disiapkan untuk menjawab tantangan globalisasi seperti masuknya persaingan tenaga kerja asing di Indonesia, ¹ masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu pengetahuan dan teknologi, kebangkitan ekonomi nasional (munculannya banyak industry kreatif dan budaya), pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, serta berkembangnya investasi dan transformasi pada sektor pendidikan.

Tujuan yang digariskan pada saat pembuatan kurikulum K-13, membawa kurikulum ini didasarkan pada metode pembelajaran yang mengacu pada 5 M, ¹⁰ yaitu: Mengamati (*observing*), Menanyakan (*questioning*), Menalarkan (*Associating*), Mencoba (*Experimenting*), dan Mengkreasikan/Menciptakan (*Creating*).

Pengembangan kurikulum K-13 (berdasar pada UU ⁴ 20/2003) menargetkan untuk dapat menghasilkan insan

Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.

Kurikulum K-13 revisi merupakan perubahan kurikulum yang berbasiskan K-13. Perubahan ini dilakukan dalam beberapa gelombang, seperti: 2017, 2018, 2019 dan 2020. Menurut Harosid (2017) terdapat beberapa poin perubahan pada kurikulum K-13 revisi yang dimaksudkan untuk menyesuaikan kurikulum K-13 pada kebutuhan yang dihadapi pada masa tersebut. Namun, meskipun terdapat perubahan-perubahan pada isi kurikulum, kurikulum baru tersebut tetap menjadi bagian dari kurikulum K-13 dan tidak menjadi kurikulum nasional. Terdapat beberapa poin perubahan kurikulum K-13 revisi pada tiap tahun:

- 2017: 1 poin perubahan, yaitu masuknya penguatan pendidikan karakter, kompetensi, dan literasi.
- 2018: 9 poin perubahan, yakni:
 1. Kurikulum K-13 revisi tetap menjadi kurikulum 2013 dan tidak menjadi kurikulum nasional (baru);
 2. Adanya penghapusan pada penilaian sikap KI 1 dan K1 2 pada tiap mata pelajaran (kecuali Agama dan

- PPKn), tetapi K1 harus tetap dicantumkan pada pembuatan RPP;
3. Pemberian nilai didasarkan pada nilai tertinggi (jika terdapat 2 kesamaan nilai praktik);
 4. Guru tidak terikat hanya dengan susunan pendekatan ilmiah 5M (harus berurutan);
 5. Menggunakan 3 kolom silabus;
 6. Ulangan Harian (UH) sebagai dasar penilaian harian, Ujian Akhir Semester (UAS) sebagai dasar penilaian akhir, serta peniadaan Ujian Tengah Semester (UTS);
 7. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tidak harus menyebutkan metode, materi sebagai lampiran, dengan rubrik penilaian (jika ada);
 8. Skala penilaian dimulai dari 1 sampai dengan 100 (penilaian sikap dibuat dalam bentuk predikat dan deskripsi); dan
 9. Pemberian (pengadaan) remidi (jika nilai kurang), tetapi harus diadakan pembelajaran ulang (nilai remidi dijadikan nilai hasil).

Titik Balik "PENDIDIKAN" Kisab Tiada Akhir

- 2019: 1 poin perubahan (pada poin 8 K-13 revisi 2018), yaitu dibahas tentang ketentuan perolehan nilai praktik tertinggi.
- 2020: 1 poin perubahan, yaitu pada penyederhanaan/penyingkatan RPP yang disusun (menjadi 1 lembar halaman).

BAB VI

CREATIVE EDUCATION PADA ABAD PENGETAHUAN

Perkembangan pendidikan di Indonesia dengan berbagai permasalahan yang ada, tentunya juga dibarengi dengan berbagai kreativitas. Kreativitas pendidikan dari berbagai pihak sebagai pemerhati bidang pendidikan, antara lain: Dikti, Depdikbud, Departemen Agama, dan lembaga yang terkait. Inovasi yang berkembang dibarengi dengan nuansa yang memuatkan kurikulum pendidikan yang berbasis pengetahuan, ketrampilan, spiritual dan social sebagai pertanggungjawaban lembaga yang disebut di atas sebagai "agen kebajikan".

Adapun berbagai bentuk kreativitas pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, yaitu *house schooling*, *m-learning* yang sering disebut *e-mobile*, dan masih banyak kreativitas dalam pendidikan yang bisa dikembangkan. Sebagai bahan pengetahuan agar diperoleh gambaran pendidikan yang dapat dikembangkan dalam praktik,

marilah kita cermati beberapa model dari *creative education*.

House Schooling

Moving class meskipun belum secara penuh dilaksanakan, tetapi Departemen Pendidikan Nasional (DIKNAS) telah mencoba untuk menerapkan model ini di beberapa sekolah, misalnya di beberapa SMP Negeri dan SMA Negeri di Surabaya, di tujuh Sekolah Tingkat Lanjutan Atas (SLTA) di Balikpapan, serta beberapa sekolah lain di kota-kota besar di Indonesia. Pada buku ini, penulis akan mencoba merancang sekolah yang memiliki *moving class* berbasis rumah yang dinamakan *house schooling*. Model sekolah ini dirancang menyerupai *moving class* dengan tiap ruang (kelas) memiliki fungsi-fungsi seperti di rumah, misalnya: makan di ruang makan, bertamu di ruang tamu, tidur di ruang tidur.

Untuk menerapkan, model ini, sekolah harus menyiapkan area-area khusus dengan fungsi seperti rumah untuk diterapkan pada aktivitas pembelajaran.

Di samping itu juga, untuk merancang sebuah sekolah yang menjawab tantangan abad pengetahuan, pelaksana (pemerintah maupun manajemen sekolah) harus memahami semua komponen yang ada di sekolah, seperti SDM, sarana-prasarana, manajemen administrasi sekolah. Semua pihak, mulai dari kepala sekolah, staff administrasi, guru pengampu mata pelajaran, siswa, komite sekolah, wali murid, sampai dengan pengawas sekolah harus terlibat secara langsung dalam kegiatan/aktivitas/proses pembelajaran.

M Learning

2 *Konsep dasar Mobile Learning (m-learning)*

M-learning atau m-learning adalah pembelajaran dengan menggunakan perangkat mobile dan melalui interaksi sosial. Perangkat mobile dapat memberikan kenyamanan untuk segala keperluan, yang salah satunya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Teknologi *m-learning* termasuk MP3 player, notebook, ponsel dan tablet. *M-learning* berfokus pada mobilitas bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan teknologi portabel. *M-learning* diharapkan dapat menumbuhkan kenyamanan

dalam belajar dan memanfaatkannya, karena yang dapat diakses dari mana saja.

Menurut Clark Quinn (2000), *m-learning* adalah sebuah media yang mengintersepsikan antara perangkat *mobile* dengan *e-learning*, media ini menjadikan proses belajar dapat dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Pendapat Quinn tersebut dikarenakan kemampuan yang kuat dari kedua media (*m-learning* dan *e-learning*) untuk mencari informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *m-learning* dapat menunjang efektivitas pembelajaran. Mengenai *m-learning*, Oller (2012) juga berpendapat bahwa model pembelajaran ini dapat membantu siswa untuk belajar di mana saja tanpa terpatasi oleh ruang.

Fungsi pembelajaran berbasis m-learning

Selama ini, *m-learning* dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas berfungsi sebagai suplement (tambahan). Di sini model pembelajaran ini hanya bersifat pilihan, maksudnya peserta didik mempunyai kebebasan memilih untuk memanfaatkan model/media ini atau tidak. Pada

1 fungsinya sebagai, suplemen, terdapat tiga alternatif kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih, yaitu:

- 1) sepenuhnya secara tatap muka (konvensional);
- 2) sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet,
- 3) sepenuhnya melalui internet.

2 *M-learning* mempermudah interaksi antara peserta didik dengan materi pelajaran, pendidik/instruktur, serta sesama peserta didik dengan cara saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut pelajaran ataupun kebutuhan pengembangan diri peserta didik. Pendidik/instruktur dapat menempatkan bahan-bahan belajar dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik di tempat tertentu di dalam websites untuk diakses oleh para peserta didik. Sesuai dengan kebutuhan, pendidik/instruktur dapat pula memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengakses bahan belajar tertentu maupun soal-soal ujian yang hanya dapat diakses oleh peserta didik sekali saja dan dalam rentangan waktu tertentu pula.

1 Munculnya *m-learning* sebagai salah satu alternatif media pembelajaran menjadi sebuah berita bahagia bagi dunia pendidikan di Indonesia. Penggunaan ponsel sebagai media pembelajaran memungkinkan program *m-learning* Akan tetapi, muncul sebuah isu baru yakni bagaimana cara untuk mengenalkan penggunaan ponsel sebagai media pembelajaran dan tidak lagi hanya sebagai media komunikasi atau hiburan. Pemanfaatan ponsel sebagai sarana untuk *m-learning* masih sangat jarang dikenal oleh masyarakat umum.

Tujuan dan manfaat pembelajaran berbasis m-learning

M-learning bertujuan untuk membantu program pendidikan di Indonesia dan dimasyarakat pada khususnya untuk memecahkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu *m-learning* merupakan salah satu pemanfaatan teknologi sebagai sarana pendidikan. Inovasi tersebut tentunya dapat menjadikan siswa lebih antusias dan mudah dalam memahami pelajaran. Selain itupula, *m-learning* dapat dijadikan sebagai ajang pengembangan Pendidikan yang berbasis kewirausahaan dan. Untuk melihat manfaat pengaplikasian *m-learning*, kita dapat melihatnya melalui dua sudut pandang, yaitu:

1. Peserta Didik

M-learning memungkinkan adanya fleksibilitas belajar yang tinggi. Ini dimaksudkan bahwa peserta didik dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Peserta didik juga dapat berkomunikasi dengan pendidik setiap saat. Dengan kondisi yang demikian ini, peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaan mereka terhadap materi pembelajaran. Manakala fasilitas infrastruktur telah menjangkau wilayah di pedesaan, maka *m-learning* akan menawarkan manfaat: 1) belajar di sekolah-sekolah kecil di daerah miskin untuk mengikuti mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diberikan oleh sekolahnya; 2) mengikuti program pembelajaran di rumah (*home schooling*); 3) bagi peserta didik 'bermasalah' (memiliki phobia dengan sekolah, atau peserta didik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, yang putus sekolah) mereka tetap dapat melanjutkan pendidikannya; dan 4) membuka peluang bagi peserta didik yang 'tidak tertampung' di sekolah konvensional untuk mendapatkan pendidikan.

2. Pendidik

Dengan adanya kegiatan *m-learning*, pendidik/ instruktur dapat memperoleh manfaat, antara lain: 1) lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi; 2) mengembang-kan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan wawasannya karena waktu luang yang dimiliki relatif banyak; 3) mengontrol kegiatan belajar peserta didik bahkan pendidik/instruktur juga dapat mengetahui kapan peserta didiknya belajar, topik apa yang dipelajari, berapa lama sesuatu topik dipelajri, serta berapa kalitopik tertentu dipelajari ulang; 4) mengecek apakah peserta didik telah mengerjakan soal-soal latihan setelah mempelajari topik tertentu; 5) memeriksa jawaban peserta didik dan memberitahukan hasilnya kepada peserta didik.

Kelebihan dan Kelemahan m-learning

Beberapa kelebihan *m-learning* dibandingkan dengan pembelajaran lain adalah sebagai berikut (Yulian, 2011):

- a. Dapat digunakan di manapun dan kapanpun.

- b. ²Memiliki harga yang relatif lebih murah (kebanyakan) dibanding PC atau laptop.
- c. ²Memiliki ukuran perangkat yang kecil dan ringan.
- d. Diperkirakan dapat mengikutsertakan lebih banyak pembelajar karena *m-learning* memanfaatkan teknologi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain dari kelebihan-kelebihan yang disebutkan, ¹⁰*m-learning* memiliki keterbatasan-keterbatasan terutama dari sisi perangkat/media belajarnya, seperti halnya:

1. terbatasnya (kecil) ¹⁰kemampuan prosesor
2. terbatasnya kapasitas memori
3. kecilnya tampilan layar
4. catu daya
5. perangkat I/O

Offline E- Learning

Sebelum membahas *offline e-learning* lebih jauh, Reigeluth dan Meril terlebih dahulu ⁶mengklasifikasikan variabel-variabel dalam pembelajaran menjadi tiga, yaitu: (1) kondisi pembelajaran, (2) strategi (methods) pembelajaran, dan (3) hasil (outcome) pembelajaran

(dalam Wena, 2009: 3). Lebih lanjut, mereka juga menyebutkan bahwa kondisi pembelajaran merupakan faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar dan diklasifikasikan menjadi tujuan dan karakteristik bidang studi, kendala dan karakteristik bidang studi, serta karakteristik siswa.

Sedangkan strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang berbeda-beda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Berikut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan strategi pembelajaran, yaitu strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan. Strategi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai efek-efek yang dapat dijadikan indikator penilaian pada pelaksanaan proses pembelajaran (Degeng dalam Wena, 2010: 6).

Berdasarkan pengantar di atas, maka sebenarnya pembelajaran *e-learning* merupakan bagian dari strategi pembelajaran, yaitu strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian pembelajaran merupakan cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran pada

siswa (Wena, 2010: 9). Menurut Degeng (dalam Wena 2010: 9), terdapat tiga komponen yang perlu diperhatikan dalam mendeskripsikan strategi penyampaian, yaitu:

- (a) media pembelajaran, komponen yang dapat dimuat pesan yang akan disampaikan pada peserta didik dan dapat berupa orang, alat, atau bahan.
- (b) interaksi siswa dengan media komponen yang mengacu kepada kegiatan apa yang dilakukan siswa dan bagaimana peranan media dalam merangsang belajar siswa.
- (c) bentuk (struktur) belajar, mengajar adalah komponen yang mengacu pada apakah siswa belajar dalam kelompok baik besar maupun kecil atau belajar mandiri.



Pengertian, Fungsi, dan Manfaat Offline ² E-learning

1. Pengertian offline e-learning

Dalam pendahuluan telah sedikit disinggung pengertian ¹ e-learning. Soekartawi (2007: 23) menjelaskan bahwa e-learning berasal dari huruf e yaitu "electronic" dan learning yang berarti pembelajaran. Sehingga, e-learning merupakan pembelajaran yang menggunakan jasa elektronika.

Pembelajaran pada prinsipnya ¹ merupakan proses interaksi antara guru dan peserta didik dengan sumber belajarnya. Proses pembelajaran ini ² dilakukan dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai alat bantu

seperti: komputer dengan berbagai software-nya, buku, jurnal, atau informasi yang ada di internet.

Sementara itu, banyak ahli yang mendefinisikan *e-learning* di mana terdapat berbagai sudut pandang mengenainya, termasuk adanya persamaan dan perbedaan. Berikut ini adalah definisi *e-learning* dari berbagai ahli (Soekartawi, 2007: 24 – 25):

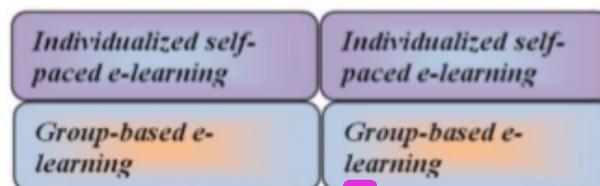
- (1) Anonymous (2000), menyatakan bahwa *e-learning* adalah istilah yang mencakup sebuah set aplikasi dan proses, seperti *web-based learning, computer-based learning, virtual classroom, and digital collaboration*. Termasuk di dalamnya *internet, intranet (LAN/WAN), audio and videotape, satelit broadcast, interactive TV, CD ROM*, dan masih banyak lainnya.
- (2) UNESCO (2000) menjabarkan istilah *e-learning* sebagai sebuah pembelajaran melalui komputer. Oleh karenanya *e-learning* selalu terkoneksi dengan jaringan computer atau menggunakan informasi yang tersedia dari computer.

- (3) Jackson (2002) dalam artikelya yang berjudul "*Defining e-Learning: Different Shades of On-line*" menyatakan bahwa on-line learning atau e-learning adalah pembelajaran yang penyampaiannya menggunakan komputer yang mana serupa dengan *technology-delivery learning* .
- (4) Soekartawi, dkk² (2002) mendefinisikan *e-learning* sebagai sebuah istilah umum untuk semua teknologi yang didukung oleh teknologi yang menggunakan berbagai alat belajar mengajar seperti ponsel, audio, dan videotapes, *tele-conference*, transmisi satelit, serta pelatihan berbasis web dan komputer sebagai alat bantu intruksi dan sering dikenal sebagai kursus online.

Berdasarkan kajian literatur di atas, diketahui bahwa *e-learning* lebih sering dimaksudkan untuk pembelajaran melalui internet atau intranet. Namun, dalam penjelasannya lebih lanjut, e-learning juga dapat diartikan sebagai pembelajaran yang didukung oleh alat elektronik seperti telepon, audio, videotape, tranmisi satelit atau komputer. Kesimpulan ini juga sama dengan penjelasan

Naidu (2006: 11-12) yang menyebutkan bahwa *e-learning* pada umumnya mengacu pada penggunaan teknologi jaringan informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar. *E-learning* meliputi: *online learning*, *virtual learning*, *distributed learning*, dan *network and web-based learning*. Naidu juga menjelaskan bahwa selama proses pembelajaran *e-learning*, kegiatan pembelajaran dilakukan secara *asynchronous* dan *synchronous*.

Istilah *e-learning* dapat pula mengacu pada kata "electronic" (huruf -e- pada kata *e-learning*) merefleksikan semua aktivitas pembelajaran baik individu maupun kelompok yang dilakukan secara offline maupun online, baik secara *synchronous* maupun *asynchronous* melalui jaringan atau hanya menggunakan komputer dan peralatan elektronik lainnya. Berikut ini model pembelajaran *e-learning*.



Gambar 1. Tipe *e-learning*



Individualized self-paced e-learning online, merupakan *e-learning* dimana individu mengakses sumber belajar secara online, baik melalui intranet maupun internet. Sedangkan, *Individualized self-paced e-learning offline* merupakan *e-learning* dimana individu menggunakan sumber belajar seperti database atau pembelajaran berbantuan komputer secara offline (ketika tidak terhubung dengan internet atau intranet). Misalnya, pembelajar secara mandiri dapat menggunakan perangkat keras seperti CD atau DVD pada proses belajar.

Bentuk lain dari *e-learning* adalah *Group-based synchronous e-learning*, bentuk ini menunjukkan di mana kelompok pembelajar bekerja bersama-sama dalam situasi

nyata melalui internet atau intranet. Misalnya: *video-conference*. Sedangkan *Group-based asynchronous e-learning* berarti kelompok pembelajar melakukan aktivitas pembelajaran dengan menggunakan internet maupun intranet di mana adanya penundaan waktu pada pertukaran informasi (bukan waktu nyata). Misalnya diskusi *online* melalui *email* dan *text conference*.

Berdasarkan kajian di atas, berikut secara runtut disajikan penjelasan mengenai *e-learning*, *offline e-learning*, *online e-learning*, *Group-based synchronous e-learning*, dan *group-based asynchronous e-learning*.

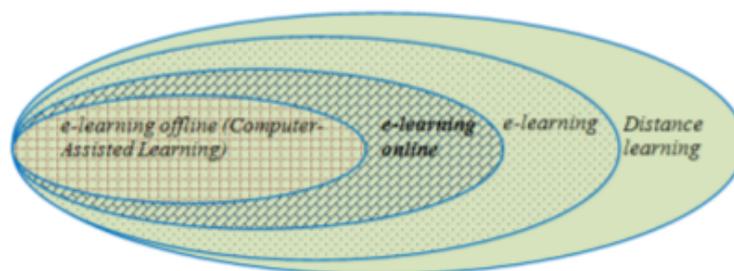
Tabel 1. *E-Learning* dan Tipe *E-Learning*

No.	Isiah	Penjelasan
1.	<i>e-learning</i>	Pembelajaran menggunakan peralatan elektronik seperti telepon, audio, videotape, tranmisi satelit atau komputer
2.	<i>offline e-learning</i>	Pembelajaran dengan bantuan komputer yang tidak terhubung dengan internet maupun intranet
3.	<i>online e-learning</i>	Pembelajaran dengan bantuan komputer yang terhubung dengan internet maupun intranet
4.	<i>Group-based synchronous e-learning</i>	Kelompok pembelajar melakukan aktivitas pembelajaran, bekerja bersama-sama dengan internet atau intranet dalam situasi nyata.

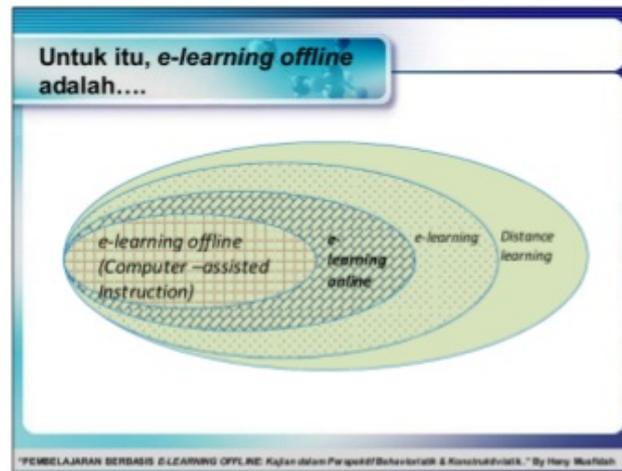
No.	Istilah	Penjelasan
5.	<i>Group-based asynchronous e-learning</i>	Kelompok pembelajar melakukan aktivitas pembelajaran dengan internet maupun intranet dimana pertukaran informasi di antara partisipannya terjadi dalam penundaan waktu

Sumber: Naidu, 2006: 12

Dari penjelasan tersebut, *offline e-learning* dapat didefinisikan sebagai metode pembelajaran menggunakan perangkat komputer yang tidak terhubung/terkoneksi dengan internet maupun intranet. Aktivitas pembelajaran *offline e-learning* pun dapat diterapkan untuk pendidikan jarak jauh (PJJ) seperti pemanfaatan CD, DVD maupun pendidikan tatap muka seperti pemanfaatan *power point presentation* (ppt). secara grafis, hubungan *offline e-learning (Computer-Assisted Learning)* dengan *e-learning* digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Kedudukan *E-learning Offline* (Simamora dalam Wena 2010)



25

2. Fungsi dan manfaat *offline e-learning*

Menurut Siahaan (dalam Wena 2009: 212 – 213) *offline e-learning* setidaknya mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- 1) sebagai suplemen pembelajaran yang bersifat opsional. *E-learning* berfungsi sebagai suplemen (tambahan), apabila peserta didik diberikan kebebasan memilih apakah menggunakan materi pembelajaran elektronik atau konvensional. Jadi peserta didik tidak ada kewajiban/keharusan untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Akan tetapi meskipun bersifat opsional, peserta didik yang menggunakan tentu akan mendapatkan tambahan pengetahuan atau wawasan.
- 2) sebagai pelengkap (komplemen) pembelajaran. *E-learning* dapat berfungsi sebagai komplemen, apabila

materi pembelajaran e-learning diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik secara konvensional di kelas (Lewis, 2002). Sehingga, pembelajaran *e-learning* ditujukan untuk *reinforcement* (pengayaan) atau *remedial* bagi peserta didik.

- 3) sebagai pengganti (substitusi) pembelajaran. Sebagai pengganti jika pembelajaran elektronik digunakan sepenuhnya dalam pembelajaran. Dengan demikian, siswa hanya belajar melalui pembelajaran elektronik saja, tanpa menggunakan model pembelajaran lain.

Offline e-learning bermanfaat baik bagi peserta didik, guru, sekolah. Bagi peserta didik, mereka dapat belajar dengan fleksibilitas yang optimal, dimana siswa dapat mengakses bahan ajar setiap saat dan berulang-ulang. Sedangkan, bagi guru, mereka dapat (1) lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan ajar sesuai perkembangan IPTEK, (2) mengembangkan diri melalui penelitian untuk meningkatkan wawasan karena waktu luang yang dimiliki semakin banyak (3) dapat mengontrol kebiasaan peserta didik, seperti: dapat mengontrol berapa lama suatu topik dipelajari dan berapakah diulang, dll (4)

mengecek apakah peserta didik telah mengerjakan soal-soal setelah mempelajari topik tertentu, (5) memeriksa jawaban peserta didik dan memberitahukannya pada peserta didik.

Selain itu, A.W. Bates 1995 dan K Wulf 1996 (dalam Wena, 2009: 214) menyebutkan manfaat-manfaat penerapan *e-learning* bagi guru yakni meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara siswa dengan guru. Sedangkan bagi sekolah, *e-learning* dapat bermanfaat untuk (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran secara keseluruhan, (2) sebagai pedoman praktis implementasi pembelajaran sesuai dengan kondisi dan karakteristik pembelajaran.



Dasar Legalitas Penyelenggaraan e-Learning

7

Pada penjelasan di atas telah disebutkan bahwa *e-learning* dapat diterapkan pada pembelajaran tatap muka dan pendidikan jarak jauh. Semua itu tergantung pada perangkat yang digunakan. Dasar hukum penyelenggaraan *e-learning* yang ada memang lebih banyak mengarah pada *e-learning* untuk pendidikan jarak jauh. Dasar-dasar hukum tersebut, sebagai berikut (Soekartawi 2007: 59 – 71):

(1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945

UUD 1945 menjadi dasar pelaksanaan *e-learning* tertinggi di Indonesia. Dasar *e-learning* yang dimaksud adalah (1) pembukaan UUD 1945 alenia IV tentang tujuan negara, "mencerdaskan kehidupan bangsa", dan (2) batang tubuh UUD 1945 pasal 12 dan pasal 31. Pasal 12 menyatakan bahwa "pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara" sedangkan pasal 31 menyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Dengan demikian,

7
penggunaan *e-learning* sebagai salah satu bentuk teknologi pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, dibenarkan oleh UUD 1945.

1
(2) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

1
Pasal 1 (15) tentang penyelenggaraan PJJ "Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain".
1
Pasal dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan *e-learning* diperbolehkan untuk mengatasi masalah antara peserta didik dan pendidik yang terpisah.

16
(3) Keputusan Mendiknas No. 107/U/2001

16
Keputusan Mendiknas No. 107/U/2001 mengatur tentang penyelenggaraan PJJ, "semua satuan penyelenggara pendidikan tinggi diijinkan menyelenggarakan PJI (Pendidikan Jarak Jauh) dengan menggunakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)/ICT (*Information and Communication Technology*), sejauh memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan: (a) sumber daya untuk merancang,

menyelenggarakan, memproduksi, menyebarluaskan, serta mengembangkan bahan ajar, (b) sumber daya untuk memutakhirkan bahan ajar, (c) sumber daya untuk menyelenggarakan, (d) sumber daya untuk menyediakan fasilitas praktikum dan/akses, (e) sumber daya untuk menyediakan fasilitas pemantapan, (f) sumber daya untuk melakukan evaluasi hasil belajar, (g) sumber daya dengan bidang keahlian manajemen, dan (h) sumber daya mengorganisir unit sumber belajar. Prasyarat-prasyarat tersebut lebih lanjut dipertegas dalam penjelasan Mendiknas pada 1 September 2005.

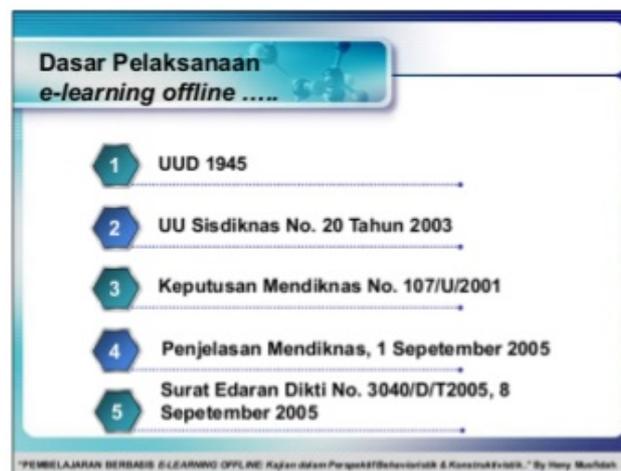
(4) Penjelasan Mendiknas, 1 September 2005

Penjelasan Mendiknas 1 September 2005 ini pada dasarnya menjelaskan tentang upaya yang perlu dilakukan lembaga yang akan menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dengan menggunakan *e-learning*. Langkah yang perlu dilakukan meliputi evaluasi diri terhadap prasyarat penyelenggaraan, permohonan izin, persiapan (infrastruktur, *software*, dan kesediaan sumber daya), pembentukan unit

pengelola PJJ, dan pertimbangan penggunaan *Blended e-Learning*.

- (5) Surat Edaran Dikti No. 3040/D/T2005, 8 September 2005

Ada tiga poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu: (a) semua penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik tatap muka maupun kelas jauh harus mengikuti norma yang berlaku, (b) karena itu, dibuat peraturan atau rambu-rambu agar pelaksanaan pendidikan berjalan sesuai dengan peraturan dan norma yang telah ditetapkan, dan (c) permintaan dikti tersebut berlaku bagi semua penyelenggara di luar Universitas Terbuka yang akan menyelenggarakan PJJ.



Offline E-learning dalam Perspektif Behavioristik dan Konstruktivis

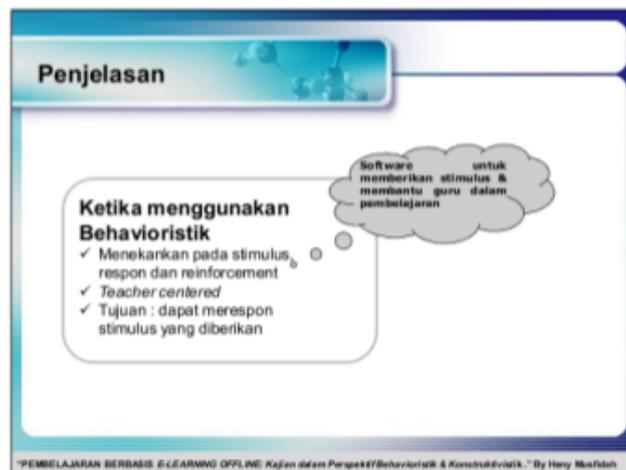
Offline e-learning memiliki kaitan dengan pendekatan behavioristik dan konstruktivis. Kaitan ini terletak pada tujuan penggunaan serta aplikasi pada semua programnya.

Kaitan e-learning offline dengan pendekatan behavioristik dan konstruktivis

Behavioristik menekankan *teacher-centered* yang dikembangkan oleh B.F. Skinner, Robert Gagne, Ricard Atkinson, Lee Cronbach, dan David Ausubel. Behavioris memandang gurulah yang memanipulasi lingkungan yang dialami oleh peserta didik, Skinner menyebutkan ini sebagai *operant conditioning*, sebuah sarana pendukung pembelajaran yang terprogram. Gaya pengajaran Skinnerian menggunakan langkah yang terencana secara hati-hati dalam stimulus penguatan respon untuk mencapai tujuan.

Teknik yang digunakan mencerminkan bahwa kaitan erat dengan penataan lingkungan di mana perilaku peserta

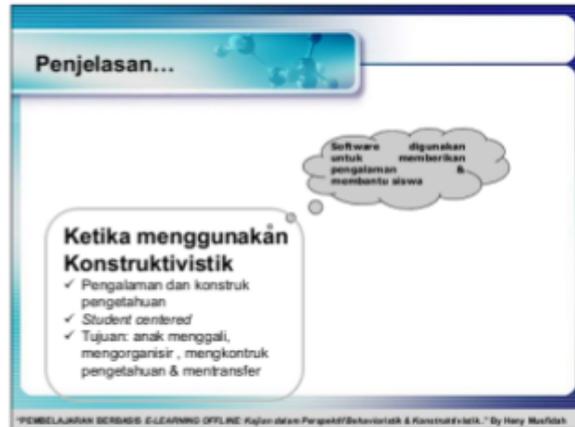
didik dapat dibentuk untuk mencapai perubahan yang diharapkan (pembelajaran). Pembelajaran kelas tradisional merupakan komponen kuat dalam teori behavioristik ini. Guru menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama. Guru aktif dalam pembelajaran dengan mengidentifikasi tujuan (perilaku yang diharapkan), merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, membimbing praktik, mendorong munculnya perhatian dalam aktivitas pembelajaran, serta melakukan penilaian terhadap pengetahuan/informasi yang diajarkan.



Pendekatan behavioristik berbeda dengan konstruktivist, yang memandang bahwa pembelajaran sebagai pengalaman hidup. Teori belajar konstruktivist

dikembangkan oleh Jerome Bruner, Seymour Papert, Jean Peaget, dan Lev Vygotsky. Dalam pendekatan ini, peserta didik menguasai langkah dan konsep selama pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah, untuk mengembangkan kemampuan berfikirnya. Selain itu, selama proses pembelajaran, peran guru adalah pemandu, fasilitator, dan teman yang mendukung. Pendidikan dianggap sebagai penyiapan pengalaman dimana peserta didik mempraktikkan pembuatan keputusan dengan simulasi situasi dunia nyata.

Guru sebagai fasilitator pembelajaran dengan memilih pengalaman belajar dengan memberikan pengalaman yang sesuai kepada peserta didik. Dengan cara ini, memungkinkan peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dan menambah keahlian yang dibutuhkan di masa depan. Secara singkat, pendekatan konstruktivis mendorong pembelajar untuk mengajukan sebuah masalah dan kemudian memecahkannya, padahal menurut behavioristik, guru berperan agar masalah terselesaikan



Software dapat merefleksikan kedua pendekatan tersebut dan tentang gaya belajar mengajar yang akan digunakan di kelas. Perbedaan teknik yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam hubungannya dengan kedua prespektif filosofis yang berbeda dari kedua pendekatan tersebut. Guru seharusnya mampu mengidentifikasi pendekatan pembelajaran diwujudkan dalam software khusus untuk memanfaatkan kelebihan komputer secara efektif di dalam kelas

titik balik

ORIGINALITY REPORT

21 %	%	%	21 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	5%
2	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	3%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
5	Submitted to Universiti Pendidikan Sultan Idris Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	1%
7	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	1%
8	Submitted to Universiti Malaysia Sarawak Student Paper	1%

9	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
10	Submitted to iGroup Student Paper	1%
11	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1%
12	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1%
13	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1%
14	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
15	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%
16	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1%
17	Submitted to Sekolah Ciiputra High School Student Paper	<1%
18	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	<1%
19	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1%
20	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1%

21	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
22	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1%
23	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%
24	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
25	Submitted to Universitas Pancasila Student Paper	<1%
26	Submitted to Universiti Kebangsaan Malaysia Student Paper	<1%
27	Submitted to Ciputra University Student Paper	<1%
28	Submitted to Universiti Teknologi Malaysia Student Paper	<1%
29	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	<1%
30	Submitted to Cardinal O'HARA High School Student Paper	<1%
31	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1%
32	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1%

33	Submitted to Hellenic Open University Student Paper	<1 %
34	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1 %
35	Submitted to University of Paisley Student Paper	<1 %
36	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	<1 %
37	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
38	Submitted to General Sir John Kotelawala Defence University Student Paper	<1 %
39	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
40	Submitted to University of Malaya Student Paper	<1 %
41	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1 %
42	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
43	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1 %

Submitted to World Maritime University

44	Student Paper	<1 %
45	Submitted to Universitas Kristen Student Paper	<1 %
46	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<1 %
47	Submitted to Sekolah Pelita Harapan Student Paper	<1 %
48	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
49	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1 %
50	Submitted to IAI KAPD Jawa Timur Student Paper	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off